

REVOLUSI KEMERDEKAAN DI BARRU 1945-1950



PERPISTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	15 - 2 - 1993
Asal dari	Fak. Sastra
Jumlahnya	2 (Dua) exp
Harga	Hadiah
No. Inventaris	93 15 2 0016
No. Kas	

SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna meraih gelar Sarjana Sastra
pada Jurusan Sejarah dan Arkeologi
Fakultas Sastra
Universitas Hasanuddin

Oleh

NURLAILAH

NO.POK : 8607007

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS SASTRA

1992

KALAM PENGESAHAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS SAstra

Desuai dengan surat tugas Dekan Fakultas Sastra Universitas
Hasanuddin No. 1991/PT04.H5.FS/U/1991 tanggal 15 Oktober
1991 dengan ini kami menyatakan menerima dan menyetujui
Skripsi ini.

Ujung Pandang,

1992

Pembimbing Utama,



Drs. Daud Limbugau, SU.

Pembantu Pembimbing,

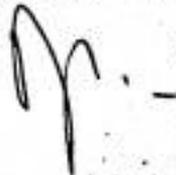


Drs. Suriadi Mappangara

Disetujui untuk diteruskan kepada
Panitia Ujian Skripsi.

Dekan,

U.b. Ketua Jurusan Sejarah
dan Arkeologi Fakultas Sastra
Universitas Hasanuddin,



Drs. Daud Limbugau, SU.

UNIVERSITAS HASANUDDIN

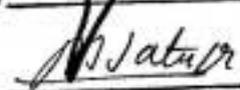
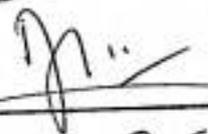
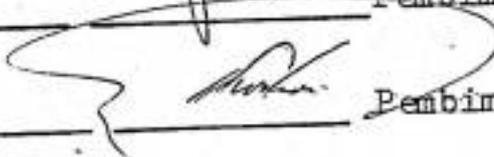
FAKULTAS SASTRA

Pada hari Kamis, tanggal 3 September 1992 Tim. Penguji menerima baik Skripsi yang berjudul :

"Revolusi Kemerdekaan di Barru 1945-1950." dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir Sarjana jurusan Sejarah dan Arkeologi Program studi Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Ujung Pandang, 3 September 1992

Tim. Penguji

1. Hamzah A. Machmoed, M.A.  Ketua
2. Dra. Ny. Ida S. Harun.  Sekertaris
3. Drs. Baharuddin Batalipu.  Penguji I
4. Drs. H.D. Mangemba.  Penguji II
5. Drs. Daud Limbugau, S.U.  Pembimbing I
6. Drs. Suriadi Mappangara.  Pembimbing II

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir untuk meraih gelar sarjana dalam bidang Ilmu Sejarah pada Jurusan Sejarah dan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa untuk membuat tulisan yang sempurna tidaklah mungkin mengingat keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Tulisan ini juga tidak luput dari kekurangan-kekurangan serta kedangkalan pemahaman terhadap objek yang dikaji. Tetapi, berkat saran dan koreksi yang berharga dari Pembimbing sehingga "celah-celah" yang ada sedikit dapat ditanggulangi. Meskipun banyak bantuan yang diterima, tetapi tanggung jawab terakhir dari tulisan ini sepenuhnya berada di tangan penulis.

Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak Drs. Daud Limbugau, S.U. dan Drs. Suriadi Mappangara masing-masing sebagai Pembimbing I dan II atas segala budi baik mengarahkan penulis dalam penyelesaian akhir tulisan ini.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada bapak dan Ibu dosen yang ada dalam jajaran jurusan Sejarah dan Arkeologi fakultas sastra unhas yang telah memberikan sebagian ilmunya kepada penulis selama kuliah berlangsung.

Kepada rekan-rekan mahasiswa sejarah yang tergabung dalam KSS-FS.UH dan HIMSA penulis menyampaikan terima kasih atas diskusi-diskusi yang diadakan di mana penulis sering terlibat di dalamnya. Kepada para informan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang diperlukan selama penelitian berlangsung penulis mengucapkan : penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Barru yang telah memberikan saran-sarannya.

Akhirnya kepada Ayahanda Murdin dan Bunda Hadawiah beserta saudara-saudaraku ; Hadrawiah, Nurmawang, Sabir, Samir dan Sudirman yang telah berkorban moril dan materil mulai dari awal kuliah hingga akhir studi ini penulis menyampaikan terima kasih. Semoga Allah Swt. memberkati kita semua.

Ujung Pandang, Agustus 1992

PENULIS

BAB I
P E N D A H U L U A N



1.1. Alasan Memilih Judul

Indonesia mulai diduduki oleh Jepang pada tanggal 10 Januari 1942. Sewaktu daerah-daerah di Wilayah Nusantara mulai dikuasai satu demi satu. Hanya dalam tempo tiga bulan Jepang berhasil menduduki seluruh Indonesia. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Letnan Jenderal H. Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda, menandatangani piagam penyerahan tanpa syarat kepada Angkatan Perang Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal H. Imamura.

Sejak itu dengan resmi Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Situasi di Sulawesi Selatan (termasuk Barru) pada waktu itu dapat dikatakan bahwa kerajaan di daerah yang sejak pemerintahan Hindia Belanda mengalami tekanan dan penindasan dari praktek politik divide et impera, bersikap pasif tidak melakukan tindakan apa-apa meskipun mereka mengetahui bahwa tentara Jepang akan menyerang dan menaklukkan kekuasaan Belanda. Tersiarnya berita tentang kedatangan tentara Jepang di Sulawesi Selatan telah memberikan harapan baru akan datangnya masa cerah, lepas dari belenggu penjajahan Belanda. Dengan tidak mendapat perlawanan yang berarti bala tentara Jepang berhasil mendarat di Sulawesi Selatan.

Pandangan yang mengatakan bahwa pasukan Belanda amat

hebat sirna sama sekali. Tentara pendudukan Jepang disambut oleh masyarakat sebagai pasukan "pembebas". Akan tetapi, sebulan setelah itu Jepang sudah mulai menampakkan tindakan yang mengecewakan di kalangan rakyat, kejam dan bengis. Dengan demikian kesadaran akan kemerdekaan dari kekuasaan bangsa asing semakin meningkat. Usaha membujuk rakyat dengan berbagai slogan tidak menunjukkan hasil yang nyata.

Di samping itu untuk menetralkan dirinya supaya jangan dianggap sebagai penjajah, mereka melancarkan teori Saudara Tua dan Saudara Muda. Karena itu rakyat Indonesia harus merasa satu keluarga dengan Jepang. Mereka sebagai saudara tua dan kita bangsa Indonesia sebagai saudara muda. Yang tua berkewajiban memimpin yang muda ke arah kemajuan, ke arah kerja sama dengan terlebih dahulu mengusir penjajah Belanda yang berkuasa sebelumnya. Propaganda itu semata-mata untuk merebut hati rakyat Indonesia agar mereka bersedia membantu Jepang. Sikap pemerintah Jepang seakan-akan memperhatikan betul tuntutan bangsa Indonesia. Mereka mengikutsertakan bangsa Indonesia duduk dalam pemerintahannya. Raja dan kaum bangsawan diberinwewenang untuk melaksanakan kembali pemerintahannya dengan pengawasan pembesar Jepang.

Di balik kebijaksanaannya itu, Jepang mulai pula memperlihatkan sikap kekerasan serta kekejamannya terhadap bangsa Indonesia. Mereka tidak segan-segan mengambil tindakan keras terhadap setiap orang yang mau mencoba melawan dan yang dianggapnya mata musuh.

Sementara itu, para pemuda dilatih untuk membantu pertahanan Jepang dalam menghadapi tekanan pasukan sekutu. Sekalipun latihan penggemblengan pemuda Indonesia dipersiapkan untuk kepentingan pertahanan Jepang, namun tidak bisa diingkari bahwa latihan-latihan itu menjadi modal pengalaman yang sangat penting bagi pemuda-pemuda di Sulawesi Selatan untuk memperkuat kesatuan-kesatuan kelasykaran nasional yang ada di daerah ini. Di saat-saat mulai runtuhnya kekuasaan Jepang dengan kekalahan-kekalahan yang diderita dalam perang Pasifik mereka mulai mengubah sikap. Jepang mulai memikat hati bangsa Indonesia. Dalam bulan Juni 1945 dibentuklah SUDARA (Sumber Darah Rakyat) sebagai wadah pemusatan segala tenaga politik, sosial, ekonomi, dan agama yang diketuai oleh Andi Mappanyukki dan sebagai wakil ketua Dr. Ratulangi. Semua itu mencerminkan usaha Jepang yang dapat dipakai untuk kepentingannya sendiri dan sekedar untuk mengikuti keinginan rakyat Indonesia di Sulawesi Selatan.

Pada Tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Selama masa tiga setengah tahun, mulai terlihat tanda-tanda berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Kepergian Jepang telah meninggalkan berbagai kesan, terutama kepada pemimpin-pemimpin yang pernah bekerjasama dengan Jepang, apakah karena terpaksa atau karena motif oportunistis,¹

¹A. J. Piekaar, "Sebuah Pandangan Belanda Tentang Perjuangan", Colin Wild dan Peter Carey, (Peny.), Gelora Api Revolusi-Sebuah Antologi Sejarah. (Jakarta : Gramedia, 1986), hal. 206. Lihat pula tulisan Frederick pada halaman 83-90.

tahun 1942 ditegaskan :

"Karena Bala tentara Dai Nippon berkehendak memperbaiki nasib rakyat Indonesia yang sebangsa dan se-
turunan dengan bangsa Nippon, dan juga hendak men-
dirikan ketentaraman yang teguh untuk hidup dan
makmur bersama-sama dengan rakyat Indonesia atas
dasar mempertahankan Asia Timur Raya bersama-sama
maka dari itu Bala tentara Dai Nippon melangsung-
kan pemerintahan militer buat sementara waktu di
daerah-daerah yang telah didudukinya, agar supaya
ada keamanan yang sentosa dan segera. ²

Sebagaimana diketahui bahwa perjuangan rakyat menen-
tang penjajah tidak pernah usai. Banyak ragamnya format
perjuangan itu diketengahkan. Ada yang dilangsungkan dengan
kekuatan senjata tapi ada pula lewat meja perundingan.
Organisasi kelasykaran bermunculan dimana-mana. Ada yang
melakukan aksi perlawanan dengan terang-terangan namun ada
pula yang mengambil strategi perjuangan "bawah tanah" atau
lazim disebut "gerakan bawah tanah"

Bentuk pemerintahan disesuaikan dengan kehendak
para penjajah. Daerah-daerah dibagi unit-unit yang lebih
kecil agar dengan mudah dikontrol aparatur pelaksana yang
terdiri dari kaum penjajah dan pejabat-pejabat pribumi, ter-
utama dari kaum bangsawan.

Sarru juga mengalami masa yang sama dengan yang di -
alami oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia. Perjuangan
bersenjata hingga revolusi fisik (1945-1950) ditandai dengan
munculnya organisasi - organisasi kelasykaran. Tujuan
perjuangan mereka menyatu dengan maksud mengenyahkan pen -

² Bayu Surianingrat, Sejarah Pemerintahan di Indonesia
Babak Hindia Belanda dan Jepang. (Jakarta: Dewaruci Press,
1981). hal 68.

jajah dari tanah Barru. Barru yang berasal dari kata "Beru" yang berarti pohon³ itu tidak pernah sepi dari perjuangan baik usaha-usaha merebut kemerdekaan maupun upaya-upaya mempertahankan. Berbagai bentuk pemerintahan telah pernah berjalan di daerah ini hingga menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II yang definitif sejak tahun 1959 sampai sekarang.

Perjuangan kemerdekaan di Barru berlangsung dalam dua daerah. Pertama, terjadi di daerah Pare-Pare sebagai basis kekuatan utama dengan Andi Abdullah Bau Massepe dan Andi Makkasau sebagai tokoh sentralnya. Kedua, di wilayah Barru sendiri dengan Andi Abdul Muis sebagai tokoh "perwakilan". Perlu dimaklumi bahwa Barru ketika itu menjadi Onderafdeeling di bawah Afdeeling Pare-Pare. Setelah Barru menjadi daerah Swapraja sejak tahun 1950, daerah ini berusaha melepaskan diri dari Pare-Pare. Berbagai usaha telah dilakukan hingga pada akhirnya tujuan itu terwujud yakni diberikannya hak otonomi oleh pemerintah pusat pada tahun 1959.

Bagaimana pola perjuangan rakyat Barru dalam usaha merebut kemerdekaan dari tangan penjajah?, dan usaha-usaha apa yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai itu?. Kiranya perlu diadakan suatu pengkajian yang mendalam untuk memahaminya agar kompleksitas masalah yang mengitarinya, dapat diterangkan dengan jelas. Untuk

³Abd, Gaffar Musa, Selayang Pandang Daerah Tingkat II Barru. (Barru : Tp., 1983), hal. 1.

6

itulah tulisan ini dikerjakan.

1.2. Masalah Dan Pembatasan Masalah

Perjuangan kemerdekaan dan gerakan anti kolonial yang mendahuluinya merupakan episode-episode penting yang sangat menentukan sifatnya dalam sejarah Indonesia. Akan tetapi perjuangan atau revolusi itu tidaklah timbul semata-mata karena kejadian-kejadian di tanah air kita, akan tetapi hal-hal tersebut tidak terlepas dari proses serta kejadian-kejadian di bagian wilayah lainnya dalam horisan yang lebih luas.

Persamaan nasib dan keterkaitan antara peristiwa dari berbagai belahan telah menumbuhkan kesadaran hidup berbangsa bagi masyarakat untuk membebaskan diri terhadap kaum penjajah. Daerah Barru sebagai sasaran studi ini, kehadirannya dalam pentas sejarah tidak bisa dilepaskan dari riak peristiwa yang terjadi di daerah lain dalam propinsi Sulawesi Selatan.

Barru setelah terbentuknya pemerintahan Belanda tidak dapat lagi disebut sebagai suatu kerajaan yang utuh. Barru dibagi dalam daerah-daerah Swapraja, seperti negara boneka bentukan Belanda. Setelah adanya pengakuan kedaulatan, daerah-daerah itu diserahkan kepada bangsa Indonesia untuk menjadi bagian wilayahnya. Kabupaten Barru pada mulanya terdiri atas daerah-daerah swapraja Mallusetasi, Soppeng Riaja, Barru dan Tanete. Peleburan keempat swa -

praja ini dimungkinkan oleh adanya Undang-Undang No. 29 tahun 1959. Adanya Undang-Undang ini merupakan titik awal bagi lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Barru dengan kepala pemerintahannya yang pertama Haji La Nakka.

Kajian tentang perjuangan kemerdekaan atau dengan istilah yang lebih populer Revolusi Kemerdekaan dapat memunculkan beragam permasalahan. Untuk obyek kajian ini penulis hanya membatasi diri pada dua permasalahan pokok yang perlu dijelaskan dan dianalisis. Permasalahan itu adalah : bagaimana format perjuangan rakyat Barru dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia baik pada masa pendudukan Jepang maupun pada zaman penjajahan Belanda ?, dan usaha-usaha apa yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai itu ? Kiranya permasalahan-permasalahan itulah yang akan dicarikan jawabannya, tentu dengan telaah yang mendalam dan dengan analisa yang lebih kritis.

Studi ini dimulai dari tahun 1945 hingga 1950, tetapi tinjauan umum (terutama masa pendudukan Jepang) dimulai tahun 1942 yakni saat mana Jepang mulai berkuasa di Indonesia dengan menanamkan sistim pemerintahan militernya. Rakyat Barru ketika itu, ditindas, dipaksa membayar pajak, dikerabkan untuk melakukan kerja rodi, gadis-gadis diculik dan dipaksa untuk "melayani" mereka, dan berbagai bentuk pemaksaan lainnya. Meskipun pendudukannya berlangsung dalam waktu yang singkat tapi menimbulkan penderitaan. Tahun 1945-1950 di Barru dan juga di daerah-daerah lainnya di

8

Indonesia banyak diwarnai oleh perjuangan bersenjata baik dilakukan secara terang-terangan maupun melalui gerakan bawah tanah dan ditambah pula dengan pertentangan politik yang sengit. Terutama tentang penyelesaian akhir dari konflik itu serta bentuk negara yang diinginkan. Lahirnya NIT adalah salah satu contoh kerumitan politik yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia Timur.

Kajian ini diakhiri hingga tahun 1950 yakni masa kembalinya Indonesia ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Getaran perjuangan hingga tahun 1950 terasa dengan jelas di Barru yaitu munculnya organisasi perjuangan yang siap mempertabahkan kemerdekaan. Lagi pula saat akhir dari revolusi fisik berakhir pada tahun 1950.

1.3. Metodologi

Sejarah sebagai pertanggungjawaban masa lampau, demikian kata seorang ahli, dapat diperoleh dari berkas-berkas dan sisa-sisa ingatan tentang suatu kejadian baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan. Berdasarkan pertanggungjawaban masa lampau inilah sejarawan berusaha merekonstruksi masa lampau itu sebagai tulisan.

Proses untuk menghasilkan sejarah sebagai tulisan ilmiah menuntut seorang penulis sejarah untuk berpegang pada metode sejarah, karena dengan metode peristiwa-peristiwa kesejarahan dapat diungkapkan secara jelas.

Sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan perjuangan kemerdekaan, terutama periode revolusi fisik yang menjadi

topik utama Skripsi ini sangat terbatas. Oleh karena itu untuk mengantisipasi keterbatasan sumber-sumber tersebut penulis menggunakan pula sumber-sumber lisan dari orang-orang tertentu yang dipandang dapat memberikan keterangan menyangkut obyek penelitian ini. "Dari keterangan lisan yang diperoleh ditambah dengan penelitian lokasi, diharapkan dapat menuntun daya imajinasi kesejarahan yang memungkinkan untuk memasuki kelampauan agar dapat dimengerti dan munculnya kembali.⁴

Hasil penelitian sumber diseleksi dan dianalisis kembali untuk mendapatkan kredibilitas dan validitasnya. Tindakan ini dipandang perlu karena tidak terelakkan setiap keterangan baik yang diperoleh dari bahan-bahan dokumen tertulis maupun lisan mengandung subyektif yang acapkali terbawa pada setiap keterangan.

Tuntutan disiplin ilmu sejarah bagi studi tentang masa lampau menuntut usaha penulisan ini dilakukan melalui tahap tahap kerja. Tahap pertama yang ditempuh adalah usaha mengumpulkan sumber-sumber keterangan tertulis. Dari keterangan tersebut sekalipun belum sepenuhnya dapat memberikan keterangan yang lengkap menyangkut studi ini, penulis berusaha juga untuk mendapatkan keterangan tambahan yakni

⁴wight dalam Taufik Abdullah, (Ed), Sejarah Lokal Di Indonesia. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1985 hal. 4.

dengan jalan melakukan wawancara. Wawancara diadakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari informan sebagai sumber yang sangat berguna. Oleh karena itu seorang peneliti yang menggunakan metode ini harus dapat mengadakan rapport dengan informan sehingga keabsahan dari data dapat terjamin.

Data dan keterangan yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara itu selanjutnya dikritik. Langkah itu dilaksanakan mengingat setiap keterangan tidak luput dari arti subyektif yang dikenakan oleh penutur atau penulisnya. Setiap keterangan yang terjamin kebenarannya akan digunakan sebagai materi dalam melakukan sintesa yang akan dilukiskan dalam karya ini. Dengan demikian akan terbangunlah suatu rekonstruksi sejarah yang utuh.

1.4. Komposisi Bab

Untuk memahami secara cermat studi tentang Perjuangan Kemerdekaan Di Barru hingga usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan diperlukan perangkat kerja dan wawasan ilmiah yang cukup agar berbagai gejala dan peristiwa-peristiwa di dalamnya dapat diterangkan dengan jelas. Urutan pembahasannya pun harus disusun secara sistimatis sehingga di antara aspek-aspek tertentu menampakkan hubungan dengan aspek yang lain. Untuk mewujudkan itu, maka skripsi ini disusun atas ;

Bab I sebagai pendahuluan yang terdiri atas alasan memilih judul, masalah dan pembatasan masalah dan metodologi.

Pada bab inilah disusun kerangka dasar sebagai pola acuan dalam penyusunan selanjutnya.

Bab II berisikan penjelasan mengenai masa pendudukan Jepang di Barru. Pada bagian ini penulis menguraikan terlebih dahulu tentang situasi perang di Pasifik di mana Jepang sebagai salah satu negara yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya diuraikan tentang proses kedatangan Jepang di Indonesia hingga pendudukannya di Barru.

Bab III membahas keadaan di Barru sekitar Proklamasi Kemerdekaan hingga kedatangan tentara Sekutu/NICA.

Bab IV tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan fokus pembicaraan pada topik terbentuknya organisasi perjuangan hingga usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan.

Bagian terakhir dari Skripsi ini adalah penutup sebagai kesimpulan dari seluruh materi yang telah dibahas dalam bab demi bab.

BAB II

BARRU PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG



2.1. Suatu Pengantar

Pada bulan Januari 1942 Belanda menjalankan suatu politik bumi-hangus yang mengerikan, dan suatu ketiadaan tertib hukum melanda daerah pedalaman di banyak daerah dengan mulai lenyapnya kekuasaan kolonial. Ini menandakan suatu akhir yang dramatis bagi Hindia Belanda sebelum kebanyakan orang di Indonesia dapat menyaksikan seorang tentara Jepang.

Maksud Jepang untuk menghancurkan keyakinan tentang keunggulan orang kulit putih di Indonesia, yang terlaksana dengan cepat memerlukan lebih sedikit usaha dibandingkan dengan tujuan utama mereka, yaitu menggantikan pemerintah orang Eropa dengan sesuatu yang lebih tepat dengan perubahan zaman. Di mata orang Jepang dan untuk jangka panjang ini berarti bukan suatu Indonesia yang merdeka tapi suatu program modernisasi dipimpin menurut pola Jepang. Oleh karena itu pada tahap permulaan semua tenaga dikerahkan untuk memulihkan keadaan damai dan tenang, menstabilkan harga dan menciptakan ketenteraman sosial, dan mengadakan perbaikan-perbaikan yang dianggap sangat penting. Nasionalisme tidak diberi peluang, walaupun gerakan-gerakan pengerahan massa dilancarkan menggalang sokongan bagi Perang Asia Timur Raya. Seperti dipahami, orang-orang Jepang tidak punya keinginan untuk mendorong gejolak

sosial atau untuk merevolusionerkan kehidupan di Indonesia, walaupun mereka sering menyatakan harapan untuk menggantikan "mentalitas kolonial"-nya dengan pandangan pribumi yang lebih bersemangat dan penuh keyakinan. Demikian pula Jepang tidak mempunyai maksud yang sungguh-sungguh untuk "me-Nipponkan" rakyat dan kebudayaan Indonesia, walaupun secara terbatas dan pragmatis usaha Jepang untuk mengajarkan dasar-dasar bahasanya dan menanamkan sebagian nilai-nilai kebudayaannya. Selain perang yang berakhir dengan kemenangan, yang diinginkan Jepang ialah bahwa daerah-daerah Indonesia yang didudukinya akan menjadi negara boneka dalam lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya yang berpusat di Tokyo. Ini akan dapat dicapai, menurut anggapan pasukan pendudukan Jepang, dengan jalan menggunakan kebijaksanaan serta pengalaman Asia untuk mengatasi masalah-masalah Asia umumnya, dengan mengartikan keberhasilan Jepang sebagai keberhasilan Indonesia dan dengan jalan mendorong atau membimbing orang-orang Indonesia ke arah kerja sama yang berhasil.

Dalam usaha yang luas tadi penguasa Jepang pada umumnya kecewa. Mereka tidak banyak mengetahui tentang Indonesia dan juga tidak betul-betul senang dalam lingkungan kehidupan mereka di sana. Dalam waktu yang tidak lama mereka menyadari betapa keliru pendapat yang terkandung dalam semboyan "Asia untuk bangsa Asia". Pemerintahan kota dan usaha-usaha untuk mengerahkan para penduduk kota, misalnya tidak pernah sepe-

nuhnya memuaskan , dan para penguasa Jepang hanya menguasai sebagiannya saja daerah pedalaman. Pemerintah kolonial gaya baru ini bagi orang Indonesia dirasakan sebagai tindakan angkuh dan kejam yang menimbulkan rasa takut. Politik ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki sistim yang sebelumnya dan guna mengatasi keadaan-keadaan darurat perang gagal mencapai tujuannya karena mendapat sambutan pahit dari semua lapisan masyarakat di Indonesia. Tindakan Jepang yang secara kasar memaksakan penanaman padi, kapas dan jarak sangat ditentang oleh para pemuka masyarakat setempat dan juga oleh kaum tani. Pemaksaan swasembada atas daerah-daerah menimbulkan kekacauan dan di sebagian daerah kehabisan persediaan. Di samping pengerahan tenaga kerja dan pengumpulan padi, kapas dan jarak secara paksa menimbulkan kebencian dibati rakyat tani. Akibat dari semua ini ikut memperbesar korupsi di segi kehidupan umum dan perorangan. Akan tetapi, keadaan-keadaan yang ditimbulkan cukup besar sumbangannya terhadap pandangan orang-orang Indonesia sekarang ini mengenai masa pendudukan Jepang itu sebagai suatu perubahan yang dramatis dari sebelumnya sebagai suatu masa penderitaan yang lebih parah bagi rakyat Indonesia.

Namun , dalam banyak segi yang penting masa pendudukan itu bukanlah perubahan mendadak bagi orang Indonesia melainkan lebih bersifat masa peralihan, walaupun peralihan itu tidak seperti yang dimaksudkan oleh pihak Jepang. Kenyataan yang demikian mungkin dapat dicari sebabnya dengan mengingat bahwa setelah pertengahan tahun 1943 kedudukan militer Jepang

di Pasifik menjadi semakin lemah dan para penguasa pendudukan merasa terpaksa untuk semakin bersikap menanggapi tekanan-tekanan kaum nasionalis Indonesia sebagai imbalan bagi janji-janji kerja sama dalam usaha peperangan. Dua faktor lain, yang sering dilupakan walaupun mempunyai arti penting turut berperan. Satu di antaranya ialah bahwa masa pendudukan itu dalam perbandingan adalah suatu masa tenang, bukan masa pergolakan fisik yang pada umumnya dihubungkan dengan waktu perang. Orang Jepang dengan pengalaman mereka di tempat-tempat lain menggambarkan kepulauan Indonesia itu sebagai suatu tempat yang damai di mana orang secara bersenang-senang dapat menghirup kopi manis dan di mana penduduk pribumi benar-benar patuh. Sekalipun demikian ini adalah yang naif dan dangkal sebab keadaan yang tenang itu hanya di permukaan saja tanpa melihat jauh ke dalam. Faktor kedua ialah cukup banyaknya titik temu antara sebagian dari politik-politik perubahan Jepang di satu pihak dan sejumlah gagasan yang sudah lama dianut oleh kaum nasionalis modern Indonesia di lain pihak.¹ Pemerintah pendudukan, misalnya, menghapuskan sistem pemerintahan pangreh praja dan Undang-Undang yang terpisah bagi masyarakat Indonesia dan Eropah dan juga untuk daerah desa dan kota. Menciptakan hanya satu garis tanggung jawab administratif di mana sebelumnya

¹Ahmad Soebardjo Djojoadisoerjo, Lahirnya Republik Indonesia. (Jakarta : Kinta, 1972), hal. 58.

tanggung jawab pegawai sipil Belanda dan pribumi saling meliputi dan mengkonsolidasi sistim pendidikan dengan jalan menghapuskan perbedaan pendidikan antara anak-anak Eropah dan pribumi. Selain itu memperlihatkan sikap tidak senang terhadap "mentalitas feodal" dari pangreh praja ciptaan kolonial serta mendorong adanya gaya yang lebih modern serta menambah semangat baru ke dalam sistim pegawai negeri. Politik dan sikap ini hampir sama dengan apa yang didukung oleh orang-orang Indonesia progresif di bawah pemerintahan Belanda, dan mereka merasa tidak ada salahnya untuk mengambil keuntungan dari persamaan ini, apa pun pandangan mereka terhadap rezim Jepang.

Keadaan seperti ini memberi kesempatan bagi naiknya pamor yang berkuasa--walaupun masih agak terbatas pada berbagai golongan orang Indonesia terpelajar yang tertarik pada politik yang pernah berhubungan dengan gerakan kemerdekaan di masa sebelum perang. Golongan intelektual ini telah mencoba menandangi pemerintah Belanda dengan membangun negara Indonesia mereka sendiri yang bertujuan untuk melakukan modernisasi dalam lingkungan kekuasaan kolonial sebagai persiapan bagi saat di mana imperialisme Eropah gagal dalam menghadapi tekanan-tekanan pihak pribumi. Mereka menganggap diri mereka sebagai harapan terbaik bagi Indonesia di masa depan, sebagai para pemimpin yang tepat dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan di zaman modern. Mereka berusaha menggantikan kekuasaan bukan hanya orang Eropah tapi juga elite tradisional.

(yang kekuasaannya mereka anggap bersifat feodal dan kolot). Dengan demikian mereka ingin memenuhi keperluan rakyat dengan jalan menciptakan masyarakat Indonesia yang diperbaharui dan berpandangan maju.

2.2. Masa Pendudukan Jepang

Masuknya bangsa Jepang di Indonesia, bermula setelah Letjen H. Ter Poorten bersama Gubernur Jenderal Garda menandatangani piagam penyerahan tanpa syarat kepada Jenderal Imamura pada tanggal 8 Maret 1942, maka sejak itu secara resmi Indonesia berada di bawah tangan pemerintahan militer Jepang atau dengan resmi disebut Bala Tentara Dai Nippon.²

Maka pendudukan Jepang dari bulan Maret 1942 sampai Agustus 1945 merupakan suatu pengalaman berat dan pahit bagi kebanyakan orang Indonesia, akan tetapi ini merupakan suatu masa peralihan. Hubungan dengan masa lampau terputus, gagasan-gagasan baru timbul, dan dalam beberapa hal, gerakan nasionalis mendapat kemajuan walaupun ada, dan karena disebabkan pengaruh dan tindakan Jepang.²

Sebelum ditandatanganinya piagam penyerahan tanpa syarat seperti tersebut di atas, Bala Tentara Dai Nippon melakukan serangan terhadap pendudukan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia dalam dua arah, yakni dari barat dan arah utara. Dari arah barat, Bala Tentara Dai Nippon Teikoku

²Harun Kadir, dkk. Sejarah Daerah Sulawesi Selatan (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hal. 91.

³William H. Frederick, "Pendudukan Jepang", Colin Wild dan Peter Carey, (Peny.), Gelora Api Revolusi - Sebuah Antologi Sejarah. (Jakarta : Gramedia, 1986), hal. 83.

melakukan serengan dengan melalui Melayu (sekarang Malaysia) terus ke Singapura, kemudian Medan dan selanjutnya ke Palembang dengan maksud utama segera mengamankan ladang sumber minyak bumi di sungai Gerong, Plaju dan sebagainya, lagi pula Jawa pendaratan bala tentaranya bermula di daerah Jawa Barat (Banten). Sedangkan dari arah utara, bermula dari Davao (Pilipina), terus memasuki kota Tarakan (Kalimantan) pada tanggal 11 Januari 1942 kemudian ke daerah Sulawesi dan Indonesia bagian Timur.⁴

Penyerahan Bala Tentara Dai Nippon Teikoku terhadap kedudukan pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi dan Indonesia Bagian Timur, khususnya dilakukan dengan kekuatan penuh dari Angkatan Laut (Kaigun) di bawah pimpinan Admiral Kurita. Diawali dengan direbutnya kota Manado pada tanggal 11 Januari 1942, dan tiga belas hari kemudian kota Kendari dan akhirnya pada bulan berikutnya ia sudah berada di daerah Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 9 Pebruari 1942 Bala Tentara Jepang ini sudah menduduki kota Sinjai dan keesokan harinya, tanggal 10 Pebruari berhasil memasuki kota Makassar dengan terle-

⁴Sartono Kartodirdjo dkk. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. (Jakarta : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1975), hal. 125 dan seterusnya. Hal yang sama diuraikan pula dalam Harun Kadir dkk. Sejarah Daerah Sulawesi Selatan. (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978). Periksa kembali catatan kaki nomor 2.

bih dahulu mendaratkan bala tentaranya di pantai sebelah Utara Galesong. Tentara Belanda yang menjaga kota Makassar segera melakukan pengunduran diri ke daerah sebelah utara (daerah Maros dan Enrekang) yang sebelumnya memang telah dipersiapkan sebagai benteng pertahanan Belanda di Sulawesi Selatan.

Tentang pemerintahan Hindia Belanda yang tadinya mempertahankan kota Makassar, karena tidak dapat membendung kekuatan dan semangat baja bala tentara Jepang sebelum mengundurkan diri terlebih dahulu mereka melakukan aksi pembakaran terhadap beberapa tempat yang mereka anggap penting dan sejumlah toko-toko milik rakyat setempat, terutama yang menjual bahan pangan.

Bala tentara Dai Nippon Teikoku yang memasuki kota Makassar tanpa mendapat perlawanan yang berarti dari pihak tentara Belanda. Selanjutnya mereka disambut oleh politisi bangsa Indonesia dan wakil-wakil pemerintahan kota Makassar. Bala tentara ini kemudian tangsi-tangsi tentara Belanda dan memasuki gedung-gedung pemerintahan sambil mencari tempat persembunyian orang-orang Belanda. Setelah mendapat perlawanan yang tidak berarti di Camba (Maros), Pare-Pare dan Enrekang dari pasukan-pasukan Belanda, akhirnya pada bulan Februari 1942 Jepang menerima penyerahan daerah Sulawesi Selatan dari tangan pemerintah Hindia Belanda tanpa syarat.

Dari Minseihu Cokam atau Gubernur Jepang di Sulawesi yang berkedudukan di Makassar, mengeluarkan pengumuman yang ditujukan kepada seluruh Kantor Afdeling dan Onderafdeling serta semua suco atau Kepala Swapraja, agar semua pegawai negeri termasuk para pegawai Swapraja, dan Adatgemeenschap melanjutkan pekerjaannya sebagaimana biasa, di bawah perintah Balatentara Dai Nippon Teikoku.

Rupanya pemerintah pendudukan Jepang di Makassar dan sekitarnya selama bulan-bulan pertama setelah menduduki Sulawesi Selatan, tidak mempunyai tenaga yang cukup terutama untuk tugas-tugas sipil. Sehingga pada mulanya di luar kota Makassar, seperti Barru (kerajaan Barru, Tanete, Soppeng Riaja dan Mallusetasi) tidak didapatkan pejabat sipil yang mengendalikan pemerintahan, kecuali hanya ada di Pare-Pare dan Watampone. Barulah pada pertengahan tahun 1942 Jepang menempatkan seorang kepala Onderafdeling pada bekas-bekas kerajaan atau distrik Tanete, Barru, Soppeng Riaja dan Mallusetasi dengan sebutan "Bunkem Kanrikan", sebagaimana daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Menurut salah seorang informan, pada masa itu bentuk struktur pemerintahan yang dijalankan oleh pendudukan Jepang, yang dahulunya pada masa pemerintahan Belanda di sebut distrik diganti dengan sebutan Gun, yang dikepalai oleh seorang pejabat dengan sebutan Gun Co.

Sebutan jabatan yang dirubah antara lain, misalnya

Kepala Onderafdeling Barru yang berkedudukan di kota Barru atau di Sumpangminangae, yang meliputi Swapraja Barru, Tanete, Soppeng Raja diganti dengan seorang opsir Jepang dengan sebutan Bunker Karrikan. Demikian pula istilah Lanschaap dirubah dengan sebutan " Syuu " dan Regenchaap di ganti dengan " Ken ", dan di bawah ken adalah " si ".

Pada dasarnya struktur organisasi pemerintahan daerah Barru di masa itu tidak mengalami perubahan, demikian pula bentuk pemerintahan masih tetap berpegang pada dasar hukum kolonial Belanda yang lama, yaitu Zelfbestuur Regelan 1938. Tetapi baik nama jabatan maupun pemangku jabatan diganti dengan istilah/sebutan dari bahasa Jepang dan orang-orang Jepang sendiri sebagaimana disebutkan diatas.

Pada masa itu daerah Sulawesi Selatan dibagi dalam enam struktur/pembagian daerah kecil, setingkat dengan Kabupaten, yang masing-masing di pimpin oleh seorang Ken Karikan. Keenam Ken Karikan itu adalah : Makassar Ken Karikan dengan Makassar sebagai ibukota, meliputi Gowa Maros, Pangkajene dan kepulauan, Takalar dan Jeneponto. Pare-pare Ken Karikan dengan ibukota Pare-pare sebagai pusat, yang meliputi Barru, Sidrap, Pinrang, dan Enrekang Luwu Ke Karikan dengan Palopo sebagai ibukota yang meliputi Palopo, Masamba, Malli, Makale dan Rantepao. Bone Ken Karikan dengan Watampone sebagai pusat, yang meliputi

Bone, Soppeng, Wajo, Simjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Dan Mandar Kem Karikan dengan Majene sebagai pusat, yang meliputi ; Majene, Polewali, Mamasa dan Mamuju.

Kemenangan Tentara pendudukan Jepang atas Hindia Belanda di Indonesia pada umumnya, dan khususnya di daerah Sulawesi Selatan pada awalnya mendapat sambutan positif dari bangsa Indonesia, terutama para raja-raja atau bangsawan. Jepang berhasil mengambil simpatik rakyat, dengan gerakan Tiga A-nya dengan semboyan : Saudara Tua, Perang suci, dan Kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, dan sebagainya yang sangat mudah diterima oleh rakyat. Dengan rasa gembira dan penuh simpatik rakyat menganggap bahwa bangsa Jepang benar-benar adalah penyelamat dari kaum penjajah Belanda. Namun pada akhirnya nampak keaslian pihak pendudukan Jepang yang telah berubah menjadi "imperator". Saudara Tua harus dihormati oleh saudara muda. Simpatik rakyat di Sulawesi Selatan terhadap pendudukan Jepang kira-kira hanya berlangsung kurang lebih satu bulan saja, sebab setelah itu berubah menjadi antipati, yang disebabkan oleh tingka laku tentara Jepang, seperti menindas dan merampas harta benda ; Pemungutan pajak secara paksa, memaksa gadis-gadis melayani mereka, dan berbagai jenis pemerasan lainnya.

Jepang menjalankan roda pemerintahan di daerah Sulawesi Selatan dengan cara-cara tangan besi dan tanpa belas

kasihan. Keadaan yang demikian itu menyebabkan sikap masyarakat yang mulanya bersimpatik, berbalik menjadi rasa benci yang mendalam. Ditambah dengan keadaan ekonomi yang sudah tidak menentu lagi karena beberapa jenis kebutuhan pokok yang selalu didatangkan dari luar daerah pada zaman pemerintah kolonial Belanda sudah dihentikan. Dalam keadaan yang serba sulit penduduk masih dipaksakan untuk membantu Jepang. Apa saja yang dihasilkan kebun dan sawah rakyat harus diserahkan pada pihak Jepang. Dan kaki tangan mereka sudah siap sedia dengan segala macam cara untuk memperoleh yang diinginkan. Jika tidak diberikan dengan sukarela, diambil dengan paksa sekalipun disimpan diatas loteng rumah rakyat, tanpa diperhitungkan dan tidak diperdulikan, apakah tersedia makan untuk rakyat atau tidak. Demikian pula rakyat dilarang menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilarang melakukan pertemuan atau berapat, dan pengimbaran bendera merah putih harus mengikuti ketentuan yang digariskan oleh pihak Jepang, seperti pemakaian bendera Sang Saka Merah putih harus lebih rendah dari bendera asi Matahari Jepang. Dan setiap rakyat yang berpapasan dengan serdadu Jepang harus tunduk, sebagai rasa hormat. Di tambah lagi, bagi setiap rakyat di setiap hari diharuskan memberikan penghormatan kepada Tenno Heika di Tokyo dengan membungkukan badan kearah matahari terbit.

Kekejaman dan penindasan pendudukan Jepang yang di -

kemukakan di atas juga dialami oleh penduduk Barru pada masa itu sebagaimana pula yang dialami daerah-daerah lain di Indonesia. Namun, hal itulah kelak yang menimbulkan rasa kesadaran pada rakyat Indonesia sendiri untuk melepaskan diri dari kaum penjajah. Bersatu menggalang persatuan nasional untuk bangkit melepaskan diri dari belonggu derita menuju cita-cita kemerdekaan. Akibatnya timbullah perlawanan di mana-mana di seluruh Indonesia melawan fasisme Jepang tersebut, termasuk daerah Barru sendiri.⁵

⁵Harun Kadir, dkk. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Di Sulawesi Selatan 1945-1950. (Ujung Pandang : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1984), hal. 115-116.

BAB III

SEKITAR PROKLAMASI



3.1. Sekitar Proklamasi Kemerdekaan RI

Dalam suasana perang Dunia ke-II, di front Pasifik bala tentara Jepang terus mengalami kekalahan secara berturut-turut menyebabkan pulau Iwojima dapat direbut oleh tentara sekutu pada bulan Maret 1945. Dalam keadaan terjepit itu, Jepang menghadapi pula perlawanan akibat kebencian dan dendam kesumat rakyat Indonesia. Menyadari akan hal itu maka Jepang menghembuskan rayuan dan janji guna memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Gerakan tiga A, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia dan Nippon Cahaya Asia, yang didirikan sejak tibanya di Indonesia di ganti menjadi Tenaga Rakyat, yang kemudian disingkat menjadi PUTERA. Tokoh-tokoh perlawanan khususnya yang berasal dari Indonesia bagian Timur yang sementara berada di Jakarta diajak kembali ke daerahnya masing-masing dengan tujuan akhir: memenangkan Perang Asia Timur Raya

Para tokoh-tokoh pergerakan nasional di daerah Sulawesi Selatan secara gigih pula melakukan kegiatan-kegiatan terutama mengorganisasi diri di bidang politik hingga pada akhirnya membentuk suatu wadah perjuangan yang di beri nama (Sumber Dara Rakyat), yang dulunya bernama Syu Kai Gi Im, bentukan Jepang. Organisasi ini dipimpin oleh Andi Mappanyukki (Raja Bone), wakilnya ialah DR. Ratulangsi dan dibantu oleh anggota-anggota pengurus lainnya, seperti : Najamuddin

Daeng Malewa, Lanto Daeng Pasewa, A. Tahir, G.R. Pantouw, Mr. Binol, Hajarati, Abdul A. Wahab Tarru dan Opu Toma.¹ Wadah perjuangan ini dibentuk secara vertikal sampai di daerah-daerah Swapraja dalam adat Gamenschap di Sulawesi Selatan.

Kurang lebih tujuh belas bulan sebelum kekalahan Jepang di medan perang pasifik, yaitu pada tanggal 30 April 1944, di Makassar Ir. Soekarno dan Mr. Soebardjo tiba dari Jakarta. Tujuan kedatangannya ialah untuk bertemu dan melakukan pembicaraan dengan raja-raja di Sulawesi Selatan tentang kemerdekaan yang dijanjikan oleh pihak pendudukan Jepang. Pertemuan ini berlangsung di hotel Ampirre, hadir antara lain : Andi Mappanyukki (raja Bono), I Mangimangi Bontonombo (raja Gowa Tua), Karaeng Bantaeng, Maradia (Mamuju), Maradia Campalagian, DR. Ratulangi, Mr. Tajuddin Noer, Najamuddin Daeng Malewa, Manai Sophaan dan lain-lain. Sebelum pertemuan berlangsung Ir. Soekarno dan Mr. Soebardjo terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan pihak Kaigun di Makassar. Kedatangan Ir. Soekarno dan Mr. Soebardjo mendapat sambutan yang meriah dari masyarakat Sulawesi Selatan. Untuk pertama kalinya diadakan upacara pengibaran bendera merah putih di lapangan Hasanuddin. Juga pertemuan antara Soekarno-Soebardjo dengan para pemuda-pemuda pelajar di bioskop Sirene. Di tempat inilah Abdul Majid bersumpah sambil mengi-

¹Sarita Pawiloy, Arus Revolusi Di Sulawesi Selatan. (Ujung Pandang : DHD "45" Propinsi Sulsel, 1987), hal. 71.

barkan sang saka merah putih, "demi Tuhan bendera sang merah putih hanya bisa diturunkan apabila mayat-mayat pemuda Indonesia telah dilalui.²

Seperti yang dikemukakan di atas, bahwa satu-satunya wadah yang dibentuk untuk pertama kalinya oleh tokoh-tokoh di Sulawesi Selatan dalam mengorganisasi perjuangan untuk menuju kemerdekaan sesuai janji Jepang adalah SUDARA (Sumber Darah Rakyat) pada tanggal 9 Juli 1945 yang dipimpin oleh Andi Mappanyukki (ketua kehormatan) dan Ratulangi sebagai ketua umum. Organisasi ini ternyata mampu meningkatkan usaha-usaha perjuangan para pemimpin rakyat, bangsawan-bangsawan dan rakyat. Sebagai tindak lanjut dalam mengorganisasi para pemuda, tokoh-tokoh dan bangsawan-bangsawan terutama di daerah Barru dan sekitarnya, maka atas sponsor Abdullah Bau Massepe, dilakukanlah pertemuan di Pare-Pare pada tanggal 23 Juli 1945. Dalam pertemuan ini hadir para pemimpin-pemimpin pemerintahan yang berada dalam wilayah bekas Afdeeling Pare-Pare bentukan pemerintah Hindia Belanda, juga para bangsawan-bangsawan setempat dan tokoh masyarakat lainnya.

Melalui organisasi SUDARA ini yang berpusat di Makassar disebarluaskan dan juga dibangkitkan semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Usaha ini dilakukan pula terhadap organisasi pemerintahan seperti G.R. Pantaouw (ketua Tjihoo Mosin Hanji, Pengadilan Maros), Andi Tjallo

²Radik Jarwadi, Sejarah Korps Hasanuddin (Manuskrip) (Ujung Pandang, Tanpa Penerbit, 1972), hal. 2.

(Mallusetasi Zitiroo) dalam bidang pemerintahan sedangkan dalam bidang kemiliteran, misalnya : Manai Sophan, Andi Mattalata, Mansyur Ibrahim, Abdul Madjid, Hamzah Ilahule dari Boeiteiseintasi Makassar, Anwar Said Daeng Nai dan Senrenyo dari Jenepono, Andi Muis dari Tenete-Barru.³

Dalam kesibukan pengurus SUDARA membina dan membangkitkan kesadaran Nasional untuk menuju kemerdekaan, tiba-tiba datanglah seorang Opsir Jepang utusan dari Nishisima membawa surat untuk pimpinan SUDARA, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945, untuk menyampaikan surat dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang mengundang utusan dari Sulawesi guna menghadiri rapat diselenggarakan di Jakarta. Atas beberapa pertimbangan, pengurus SURADA mengutus DR. Ratulangsi, Andi Pangerang Petta Rani, dan Andi Sultan Daeng Raja, serta didampingi oleh seorang sekretaris. Mr.A.Z. Abidin untuk segera berangkat ke Jakarta guna memenuhi undangan tersebut. Keberangkatan mereka itu terjadi pada tanggal 10 Agustus 1945.

Bertepatan dengan keberangkatan delegasi Sulawesi ke Jakarta, pemerintah Jepang juga mengirimkan pernyataan bertekuk lutut kepada tentara Sekutu. Sementara itu pula di sekitar pertengahan bulan Agustus 1945 delegasi Sulawesi yang ke Jakarta guna memenuhi undangan rapat/ sidang Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), kembali ke Makassar dengan memumpang pesawat terbang milik Jepang, yang

³ Harun Kadir, dkk, Op Cit. Hal.141.

mendarat di lapangan terbang militer Jepang di Sapiria (Bulukumba) karena landasan lapangan terbang Mandai telah rusak akibat pemboman Sekutu. Mereka telah mengetahui bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dan Negara Indonesia sudah harus diproklamlirkan pada tanggal 16 Agustus 1945. Tetapi ternyata tanpa diketahui sebabnya harapan mereka itu tertunda sehari.

Berita kekalahan tentara Jepang terhadap tentara sekutu membangkitkan semangat dari para pemuda Indonesia untuk segera mengumumkan Kemerdekaan Indonesia. Atas dorongan dan desakan dari pemuda akhirnya Ir. Soekarno dan Drs. Muh. Hatta menandatangani piagam pernyataan Proklamasi Indonesia pada Tanggal 17 Agustus 1945, yang kemudian diproklamasikan oleh Ir. Soekarno atas nama bangsa Indonesia pada hari itu juga. Saat-saat yang bersejarah ini dihadiri pula oleh utusan dari Sulawesi yang menghadiri rapat BPUPKI di Jakarta.

Di Sulawesi Selatan, bala tentara Jepang melarang berita Proklamasi itu diumumkan, sehingga proklamasi itu tidak pernah diketahui secara resmi. Rakyat baru mengetahui tentang adanya pemerintahan Republik, ketika pesawat radio yang pada masa pemerintahan Jepang dibatasi riak gelombangnya, dapat dipergunakan lagi dengan leluasa. Sejak saat itu rakyat mengetahui, bahwa DR. Ratulangi telah menjadi Gubernur Sulawesi dan pengangkatannya itu diterima oleh seluruh rakyat dengan gembira.

Untuk memberi penjelasan tentang kemerdekaan kepada seluruh rakyat di Sulawesi Selatan, khususnya yang terdapat di daerah-daerah pedalaman, Dr. Ratulangi merasa perlu mengadakan kontak dengan para raja-raja atau bangsawan-bangsawan sebagai pemimpinnya. A. Zainal Abidin berangkat ke pedalaman sebagai utusan Dr. Ratulangi guna meyakinkan para raja dan bangsawan tentang arti kemerdekaan yang telah diproklamirkan itu. Daerah-daerah yang dikunjungi itu antara lain : Maros Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Pare-pare, Suppa, Wajo, Sidenreng, dan sebagainya. Di setiap bekas kerajaan yang di kunjungi misi ini disambut dengan penuh kegembiraan. Dari misi ini juga para raja-raja/bangsawan-bangsawan sebagai pemimpin setempat mengetahui, bahwa Belanda dan NICA-nya akan datang kembali memperbarui penjajahannya. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan dari negara lain, karena bangsa kita telah merdeka. Tujuan dari misi A. Zainal Abidin mengelilingi bekas-bekas kerajaan di pedalaman mencapai tujuannya, yakni mempersatukan pendapat para raja sebagai wakil rakyat untuk bersama-sama mendukung Dr. Ratulangi sebagai Gubernur atau wakil syah pemerintah Republik Indonesia di Sulawesi. Oleh karena itu pemataan bentuk pemerintahan antara staf Gubernur dan pemerintah daerah dibentuk satu "Dewan Penasehat (Konen)", di

mana raja Bone bertindak-sebagai ketua, Ratulangi sebagai wakilketua dan anggota-anggotanya terdiri atas raja-raja: Gowa, Luwu, Wajo, Soppeng, Barru, Tanete, Malusetasi, Sawitto, Suppa dan Balanipa Mandar.

3.2. Kedatangan Sekutu/NICA

Pada dasarnya, kedatangan tentara Sekutu di Indonesia ialah untuk menerima penyerahan pasukan Jepang dan memulangkan ke negerinya. Agar tugas itu terlaksana dengan baik, ditambahkan dalam penugasannya ; a). menjamin terlaksananya keamanan di Indonesia, b). menjaga agar tidak terjadi perubahan status quo dalam wilayah Indonesia, dan c). mengurus para interniran bekas KNIL, dan lain-lain yang pernah disekap oleh pasukan Jepang.⁴

Pemerintah Republik Indonesia di Makassar di bawah pimpinan Dr. Ratulangi menerima baik kedatangan tentara Sekutu, terutama tentara dari Australia. Tidak ada sesuatu kejanggalan pada kesatuan ini, yang nampak adalah kesibukkan mereka mengurus pemulangan orang-orang Jepang. Akan tetapi, segera muncul desas-desus bahwa terdapat beberapa opsir Belanda dalam kesatuan Australia. Hal inilah yang menyebabkan para pemuda mulai mencurigai tentara Sekutu.

Seperti diketahui bahwa bala tentara Jepang menyatakan diri kalah dalam Perang Dunia II setelah jatuhnya bom atom di dua kota di Jepang ; Hiroshima dan Nagasaki oleh Sekutu.

⁴Sarita Pawiloy, Op.Cit. hal. 100.

Sebagai realisasi dari kekalahan itu, maka pasukan sekutu mulai melucuti senjata-senjata para serdadu-serdadu Jepang serta tawanan-tawanan sekutu. Wilayah Indonesia pada masa perang itu berada dibawah pemerintahan Militer Jepang terpaksa pula harus diserahkan kepada sekutu untuk diduduki.

Pada bulan September 1945 Komando Sekutu untuk Asia Tenggara mulai melaksanakan pendudukan pasukannya ke Indonesia. Pasukan Inggris yang terdiri atas tiga divisi ke-23 dan divisi ke-5 ditugaskan untuk menduduki daerah Sumatra dan Pulau Jawa, dan dua divisi bantuan dari tentara kesatuan Australia ditugaskan untuk menduduki Kalimantan dan Indonesia Timur, termasuk Sulawesi Selatan.

Tentara sekutu yang ditugaskan untuk mendarat di Makassar adalah pasukan Sekutu yang berada dibawah pimpinan Brigjen Iwan Dougherty. Pasukan ini mendarat di Makassar pada tanggal 21 September 1945, yaitu satu bagian dari Brigade ke-21 pasukan Australia. Bersama dengan pendaratan tentara Sekutu ini turut membonceng pula tentara NICA (Netherlands Indies Administration), dibawah pimpinan Mayor J.G. Wegner.

Mayor Wegner dari NICA dengan Jepang, sesuai hasil perundingan antara Inggris dan Belanda di London pada tanggal 24 Agustus 1945, yang lazim dikenal "Civil Affair

Agreement". Karena itulah NICA mulai melaksanakan tugas menegakkan kembali pemerintahan Sipil Hindia Belanda di Sulawesi Selatan. Di bidang Moneter Mayor NICA ini bertindak menarik semua mata uang Jepang dari peredaran dan sebagai gantinya dipakai uang NICA?, menurut nilai perbandingan kurang lebih 30 : 1. Juga mempersenjatai orang-orang Belanda. Indo, orang Ambo, serta mendemonstrasikan arak-arakan mobil yang penuh orang-orang Belanda dengan senjata guna menakut-nakuti rakyat Sulawesi Selatan, dan banyak lagi tindakan-tindakan yang dilakukan yang akibatnya menciptakan kekeruhan dan menambah hangat kemarahan rakyat.

Akibat dari itu, para pemuda hilir mudik di jalan-jalan, terutama di kota Makassar dengan menggunakan lembaran merah putih, reaksi-reaksi perlawanan terhadap pendudukan kembali tentara Hindia Belanda. Seperti demonstrasi para pemuda dengan melakukan pengibaran bendera merah putih pada tanggal 27 September 1945 di Makassar Semangat yang membara dan meluap-luap menentang kehadiran NICA ini, bertambah hangat setelah ST. Moh. Yusuf Samah yang baru kembali dari pulau Jawa mengadakan pertemuan dengan pemuda-pemuda Makassar di Kampung Layang, di mana pada kesempatan itu, beliau menceritakan tentang kehebatan dan kegigihan perjuangan pemuda-pemuda Jawa dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah

diproklamasikan⁵

Hal-hal diatas inilah yang mendorong Dr. Ratulangi segera membentuk Badan Pusat Keselamatan Rakyat(BPKR) yang merupakan wadah perjuangan mempertabahkan kemerdekaan dan merupakan wahana pengganti SUDARA yang didirikan pada masa pemerintahan militer Jepang di Sulawesi Selatan seperti yang dikemukakan pada bagian terdahulu dalam seksi ini.

Sementara para pemimpin Republik yang bernaung dalam BPKR berusaha menenteramkan kemarahan rakyat, atas kedatangan NICA dan tingkah lakunya, maka pihak NICA pun di bawah pimpinan seorang opsir yang bernama Mr.Poll berusaha menduduki daerah Sungguminasa(Gowa). Kehadiran pasukan sekutu/NICA melakukan infiltrasi kedaerah sebelah utara, yaitu Maros, dibawah pimpinan seorang opsir NICA yang bernama Stuterkeim dengan anggota serdadu berjumlah 25 orang. Kedatangan serdadu ini juga mendapat perlawanan oleh para pemuda-pemuda Maros yang didukung sepenuhnya oleh Karaeng-Karaeng dari Turikale, Marusu, Lau, Cenrana, dan Arung Camba. Demikian juga di Parepare, yang diduduki pada tanggal 6 Oktober 1945, setelah terlebih dahulu menduduki Tanete, Barru SumpangbinangaE dan Mallusetasi.

⁵Harun Kadir, dkk, Op Cit, hal. 154-155.

Akibat pendudukan itu, menyebabkan pihak Badan pusat penyelamat Rakyat (BPKR) melakukan protes kepada tentara sekutu. Pihak sekutu yang kelihatannya melindungi NICA, menyatakan bahwa NICA adalah badan resmi untuk menyelesaikan administrasi pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan. Akibat jawaban Sekutu yang demikian, akhirnya perlawanan para pemuda makin meningkat dan ada kecenderungan melakukannya dengan aksi senjata.

Karena itu di Pare-pare dan sekitarnya (termasuk wilayah Barru), maka didirikanlah cabang BPKR, sebagai wadah pendukung untuk mempertahankan kemerdekaan dengan nama Penunjang Republik Indonesia (PRI), yang dipimpin Andi Makkasau dan Abdullah Bau Masepe sebagai wakilnya serta dibantu oleh beberapa anggota utama, seperti ; Muh Baid Dg. Manessa, Muh. Amin, Abdul Gafur dan La Halide. Dan untuk menampung aspirasi para pemuda-pemuda, maka dibentuk pula Pandu Nasional Indonesia (PNI). Pada mulanya organisasi para pemuda ini bernama Pemuda Nasional Indonesia, akan tetapi atas usul DR. Ratulangi diubah menjadi Pandu Nasional Indonesia.⁶

Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada tanggal 11 Februari 1946 BPKR di ubah menjadi Pusat Keselamatan Rakyat Sulawesi (PKRS). Untuk mengkoordinir kegiatan

⁶Wawancara dengan Muhammad Ilyas, tanggal 10 Maret 1992.

kegiatan para pemuda-pemuda di daerah, serta dapat memberikan instruksi tentang perkembangan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang berpusat di kota Makassar, maka di daerah-daerah pedalaman juga didirikan cabang PKRS, seperi di Pare-pare, Sidenreng, Watampone dan Soppeng Riaja-Barru. Namun sebelum perubahan organisasi BPKR itu, kedudukan tentara Australia di Makassar digantikan oleh pasukan tentara Inggris dari Brigade ke 60, yang intinya terdiri atas pasukan Gurkha dari India, yaitu sekitar tanggal 1 Februari 1946. Dalam melakukan tugasnya, pasukan Inggris ini rupanya menaruh simpatik terhadap perjuangan rakyat Indonesia di Sulawesi Selatan dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamkan itu.

Dalam rangka membendung kegiatan infiltrasi tentara Sekutu/NICA di daerah-daerah pedalaman, terutama untuk mengembalikan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan khususnya di daerah Sulawesi Selatan, maka dalam wilayah bekas kerajaan Soppeng (termasuk Soppeng Riaja-Barru) oleh para pemuda-pemuda Soppeng membentuk organisasi yang bernama GAPIS (Gabungan Pemberontak Indonesia Sulawesi), yaitu pada tanggal 27 Oktober 1945. Organisasi pemuda GAPIS ini dipimpin oleh beberapa tokoh penting seperti: M. Idris Palungeng, M. Arsyad Tamimi, M. Muria, A. Maddiheng A. Azis Tamimi dan lain-lain. Organisasi ini pada mulanya

bernama Pemuda Nasional Indonesia (PNI) Soppeng di bawah pimpinan Andi Mahmud Petta Panggulu Galung. Pada hakekatnya GAPIS lebih banyak bertindak dalam kegiatan militer, bila dibandingkan dengan kegiatan politik. Mereka melancarkan sabotase terhadap tentara NICA, serta beberapa kali melancarkan serangan-serangan gerilya secara mendadak terhadap pasukan patroli NICA.

Sedangkan di Makassar, yakni sekitar akhir tahun 1945 beberapa tokoh pemuda mengadakan rapat rahasia di Jongaya. Rapat ini menghasilkan suatu bentuk organisasi pemuda yang bernama Pusat Pemuda Nasional Indonesia (PPNI) dimana anggota-anggotanya didukung lebih dari 25 kelompok organisasi pemuda dari bekas organisasi SUDARA, bekas SEINENDAN dan lain sebagainya. Selanjutnya organisasi PPNI ini kemudian melebar ke daerah-daerah pedalaman Sulawesi Selatan, seperti didirikannya cabang di bekas wilayah Kerajaan Tanete Barru dengan nama PPNI Tanete-Barru (Pusat Pemuda Nasional Indonesia, Tanete-Barru).

Sebagaimana organisasi-organisasi lainnya di daerah pedalaman Sulawesi Selatan, dalam rangka mempertahankan dan mendukung proklamasi 17 Agustus 1945, pada umumnya dikoordinir dari Makassar, yang merupakan Makassar, yang merupakan pusat gerakan pemuda pejuang di Sulawesi Selatan. Selain Makassar sebagai pusat perjuangan juga di Polobangkeng, Suppa, Mandar, Luwu dan Bantaeng. Kecuali

daerah Luwu pusat perjuangan tidak dikoordinir dari Makassar. Uraian yang lebih rinci mengenai gerakan pemuda atau organisasi perjuangan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan di daerah Barru akan dikemukakan pada bab IV.

BAB IV

PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN

4.1. Terbentuknya Organisasi Perjuangan

Pada mulanya organisasi perjuangan kemerdekaan di Barru adalah PPNI (Pusat Pemuda Nasional Indonesia) Tanete-Barru yang merupakan cabang dari Pare-Pare yang dipimpin oleh Andi Abdullah Bau Massepe. Organisasi ini merupakan pengganti dari organisasi SUDARA (Sumber Darah Rakyat) yang dibentuk pada masa pemerintahan Jepang. Di Tanete-Barru PPNI dipelopori oleh Andi Abdul Muis, namun kemudian organisasi ini dirubah namanya menjadi PNI (Pandu Nasional Indonesia) atas usul dan saran-saran yang dikemukakan oleh Dr. Ratulangi. Kemudian PNI dirubah menjadi PRI (Pemuda Republik Indonesia) yaitu pada tanggal 5 Oktober 1945, dan akhirnya sesuai peranannya sebagai organisasi kelasykaran dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan, maka organisasi PRI itu akhirnya dirubah menjadi PKR (Pembela Keamanan Rakyat) pada tanggal 1 Maret 1945.

Sebenarnya pembentukan badan perjuangan sudah dimulai sejak berita proklamasi diumumkan dan diketahui oleh rakyat di Sulawesi Selatan. Pada waktu pendaratan Sekutu yang diboncengi NICA pembentukan kekuatan semakin jelas.

Di bekas wilayah kerajaan Soppeng Riaja terdapat nama gerakan Pemuda GAPIS (Gabungan Pemberontak Indonesia Sulawesi). Ruang lingkup perjuangan dan kegiatan-kegiatan

organisasi ini berpusat di Kampung Barru, Soppeng Riaja di bawah pimpinan M. Idris dan Arsyad Tamimi. Dalam wilayah (bekas) kerajaan Soppeng Riaja di Barru, juga terdapat nama organisasi pergerakan mempertahankan kemerdekaan, yaitu Badan Siasat Krisis Soppeng Riaja di Pare-pare Soppeng Riaja dan sekitarnya.¹ Namun nama organisasi ini tidak disebutkan tokoh-tokohnya.

GAPIS pada hakekatnya adalah merupakan satu gerakan pemuda yang dibentuk oleh para pemuda-pemuda Soppeng, dimana ruang lingkup operasionalnya meliputi seluruh wilayah bekas kerajaan Soppeng, yang pada mulanya dipimpin oleh Andi Mahmud Petta Panggulu Galung, yang didirikan pada tanggal 27 Oktober 1945. Pada dasarnya organisasi GAPIS melakukan kegiatannya terfokus pada usaha-usaha menentang NICA, dengan tokoh-tokoh penting seperti ; M.Arsyad Tamimi A, Azis Tamimi, A.Maddiheng dan lainlain.

Sedangkan didalam wilayah Kerajaan Tanete, para pemuda mendirikan organisasi dengan nama "Pemuda Pejuang Tanete - Barru", dibawah pimpinan tokoh-tokoh pemuda seperti :Andi Abd,Muis, Abd.Kadir Jaelani, Andi Abdul Syukur,Andi Amir Andi Osman dan beberapa kepala Kampung Garessi.

Dalam membina kekuatan para pemuda Tanete itu, mereka mendatangkan pelatih tertentu dari Makassar secara bergi -

¹Lihat Muh. Arfah, Biografi Pahlawan Andi Abdulah Bau Masepe, (Ujung Pandang ; 1980), hal. 8.

liran antara lain :Ali Malaka, Alimuddin, Ponto, Ishak Sumaro dan Sutomo. Di lain pihak, juga para tokoh-tokoh gerakan para pemuda Tanete itu berusaha membentuk suatu organisasi dari kaum wanita, yang merupakan pendukung perjuangan para pemuda-pemuda. Dari sana muncullah Istri dari pimpinan pemuda pejuang Tanete Barru, Andi abd. Muhs, yang bernama Andi Hadjerah. Organisasi wanita ini diberi nama "Barisan Wanita Pembantu Pasukan". Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi pemuda Pejuang Tanete Barru lebih dikenal dengan sebutan GPT (Gerakan Pemuda Tanete-Barru). Gerakan pemuda Tanete-Barru dalam rangka menjalin kerja sama dan koordinasi yang baik dengan para kesatuan-kesatuan lainnya di daerah, terutama disekitar wilayah Suppa dan Pare-pare, maka pimpinannya, A.Abd.Muhs memenuhi panggilan Andi Abdullah Bau Massepe, selaku pimpinan BPRI (Badan Pemberantak Rakyat Indonesia) Pare-pare. Dalam pertemuan tersebut, menghasilkan kesepakatan untuk melakukan beberapa kegiatan sesuai kemampuan organisasi atau kelasykaran, antara lain ; penghadangan terhadap tentara NICA, memutuskan kawat telekomunikasi antara Makassar dengan Pare-pare dibawah pimpinan Sumaro.

Pada bulan Nopember 1945, di Pare-pare diadakan pertemuan antara para raja-raja dan pengurus organisasi perjuangan dalam wilayah Afdeling Pare-pare. Andi Abd. Muhs beserta Andi Abdul Kadir, selaku tokoh organisasi

GPT - Barru dan atas nama rakyat kerajaan Tanete dalam pertemuan itu turut menandatangani suatu petisi yang ditujukan kepada PBB yang berunyi : "rakyat Tanete Barru dan sekitarnya menolak kembali Belanda di Indonesia dan menyokong sepenuhnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.² Petisi ini oleh para peserta diawali dengan pembacaan ikrar dan sumpah bersama. Pada awal Desember 1945 pimpinan BPRI (Badan Pemberontak Republik Indonesia)-Pare-Pare. Andi Abdullah Bau Massepe datang ke Tanete begitu pula Andi Muis dan Andi Abdul Kadir. Dalam kunjungan itu Andi Abdullah Bau Massepe menyampaikan pesan dan instruksi gubernur Sulawesi, Dr. Ratulangi, bahwa pada hakekatnya kita tidak menganggap tentara sekutu (baca : Australia) itu musuh atau lawan, tetapi yang dianggap lawan adalah tentara Belanda saja. Hendaknya perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan itu dilakukan dengan cara-cara diplomatik saja, bukan dengan kekerasan seperti dengan persenjataan guna menghindari banyaknya korban yang sia-sia. Namun pimpinan GPT, Andi Abdul Muis tidak dapat menerima pesan atau instruksi gubernur itu bahkan di luar pengetahuan beliau selaku pimpinan GPT, sekelompok pemuda Tanete-Barru telah melakukan penghadangan terhadap iring-iringan tentara Sekutu (Australia dan Sekutu) di tikungan jalan Butung, Mandalle, Coppeng-Coppeng dan Tom-

² Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kabupaten Barru, 'Data Sejarah Pendaratan TRIPS Di Daerah Barru' Bahan Seminar DHD 45 Barru, 1986, (Barru : 1986), hal. 11., Abd. Gaffar Musa, Selayang Pandang Daerah Tingkat II Barru. (Barru : Tanpa Penerbit, 1983), hal. 38.

na. Akibatnya rumah kediaman Abdul Muhs ditembaki oleh tentara Australia/NICA.³

Organisasi lain yang pernah melakukan kegiatan perjuangan di dalam wilayah Barru, adalah Hariamau Indonesia (HI). Organisasi perjuangan ini dibentuk oleh para pemuda-pelajar dengan corak militer pada bulan Januari 1946 di Panciro dengan pengurus antara lain; Muhammad Syah, Maulwi Saelan, Robert W. Monginsidi, Dg. Marala, M. Jabir Bahang, Yanci Raib, Hasanuddin Nawing, M. Kasim Ali Coudri, Sangkala Relli, Wagimin, Patri Abdullah, dan lain-lain. Organisasi kelasyakaran Hariamau Indonesia memang cukup luas wilayah operasinya, yakni dari ujung Selatan Pangkajene (Pangkep) sampai daerah bulu - dua dan Biloka, dengan daerah pertahanannya mencakup daerah-daerah Barru, Tanete, Soppeng Riaja dan Pare-pare.

Setelah beberapa waktu organisasi HI memusatkan perhatiannya pada penyerangan, sabotase dan tindakan gerilya terhadap kota Makassar, maka pasukan pimpinan Bahang dan Hakim Nawing menuju ke Pangkajene (Pangkep) dan melakukan kegiatan penyerangan terhadap kedudukan NICA di sana. Dan bagian lainnya di bawah pimpinan R.W. Monginsidi tetap melancarkan aksi terhadap kedudukan NICA di kota Makassar. Pasukan HI yang berpindah ke daerah Pangkep, juga bergerak menuju kedaerah-daerah sekitarnya, yaitu Segeri Man-

³Muh Arfah, Op.Cit. Hal. 47.

dalle, Tanete-Barru, Soppeng Riaja, dan Enrekang.⁴

Seperti daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan, dimana organisasi-organisasi perjuangan dan gerakan pemuda yang akhirnya membentuk nama-nama kelasykaran setempat, yang tujuan sama untuk mempertabankan proklamasi kemerdekaan dan menghancurkan rencana NICA yang hendak menegakkan kembali kekuasaan pemerintah Belanda di Sulawesi Selatan, berusaha mengorganisasikan kesatuan komando dalam satu wadah. Demikian pula organisasi perjuangan di daerah Barru, seperti GAPIS, PNI, KRIS Soppeng Riaja dan GPT, tetap mengikuti perkembangan yang terjadi di Makassar dan sekitarnya. Oleh karena itu dalam mewujudkan rencana penyatuan wadah organisasi perjuangan yang tersebar di setiap daerah dalam satu wadah, maka dilakukannya suatu pertemuan di antara pimpinan-pimpinan organisasi perjuangan di Kemara pada tanggal 15 Juli 1946. Dalam pertemuan itu hadir antara lain ; M. Riri Amin Daud dari Kris Muda Mandar, Amiruddin Muchlis dari PPNI Makassar, Bahang dari Hariama Indonesia. Dg. Bonto dari AMRIS selayar, dan Ali Malaka sebagai wakil dari gerakan Tanete-Soppeng.⁵ Dari hasil pertemuan diatas, maka lahirnya suatu wadah kesatuan organisasi kelasykaran bendera

⁴Harun Kadir, dkk. Op Cit, hal. 199.

⁵Harun Kadir, dkk. Op Cit, hal. 227

Merah-Putih serta diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Muh. Yusuf di Ramaya. Upacara ini dilakukan pada jam 09.00 yang dihadiri oleh kurang lebih 100 orang.⁶ Tujuan perjuangan yang dicanangkan oleh LAPRIS adalah Indonesia merdeka dalam bentuk Republik yang berke-
 daulatan rakyat dan sebagai Negara Kesatuan" sedangkan organisasi kelasykaran yang menyatakan diri sebagai anggota LAPRIS pada masa itu, ialah PPNI (Pusat Pemuda Nasional Indonesia)-Makassar, BPI (Badan Perjuangan Indonesia)-Makassar, BPRI (Badan Perjuangan Republik Indonesia) Maros dan Camba, LAPTUR I dan II masing-masing di Jeneponto dan Bangkala, Lipang Bajeng-Pollengbangkeng, Harimau Indonesia (HI) Makassar dan Tanete, BPRI-Suppa, PPI Bantaeng, BUKA-Limbung, AMRIS-Selayar, GAPIS-Soppeng, PBAR-Bulukumba, KRIS Muda-Mandar dan Gerakan Pemuda Tanete (GPT)-Barru.

Selain organisasi perjuangan yang bersifat radikal itu, maka organisasi lainnya yang bersifat sosial pun mulai bergerak sendiri-sendiri namun saling bantu membantu, seperti dengan jalan membina kader-kader pemuda, mengumpulkan makanan, pakaian-pakaian bekas, obatan-obatan, uang serta barang-barang lainnya. Organisasi itu antara lain Pandu Hisbul Wathan dari Muhammadiyah, dengan tokohnya antara lain Andi Azis Tamimi, Pemuda Pelajar Darul Dakwah wal Irsyad, serta Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dengan tokoh- to-

⁶ Harun Kadir, dkk. Op. Cit. hal. 229.

kohnya antara lain ; Mursalim Remang, Haji Bica, Abd. Rahman Rahe, H. Celunde, Andi Domeng dan Passelowongi. Sedangkan tokoh-tokoh PSII cabang Tanete Muh..Amin, Abdul Hakim, La Nombeng, Abd. Kadir dan lain-lain. Organisasi sosial ini berdasarkan Islam.⁷

PSII cabang Barru dalam struktur organisasinya membawahi dua Zelbestuur, masing-masing Zelbestuur Barru dan Zelbestuur Tanete, yang didirikan pada tahun 1928 oleh Andi Abdul Kadir, sesaat setelah beliau mengundurkan diri dari naungan cabang Barru. PSII cabang Barru ini merupakan cabang yang berada di bawah koordinasi langsung PSII Pusat yang berkedudukan di Jakarta. Pada masa itu tokoh-tokoh PSII cabang Tanete yang duduk sebagai pengurus antara lain : Muh. Amin (ketua), Abd. Kadir Dg. Mangun (wakil ketua), Abd. Kadir Dg, Mamala (sekretaris) dan dibantu oleh beberapa pengurus lainnya, seperti Lolo Bandu, S. Hassan, H. Calunde, H. Abdul Kadir Jaelani, Abdul Karim dan sebagainya.⁸

Beberapa sumber yang diperoleh tentang kegiatan-kegiatan organisasi PSII baik sebelum masa pergerakan kemerdekaan maupun pada masa mempertahankan kemerdekaan RI di wilayah Barru. Pertama, adalah gerakan yang ditimbulkan oleh masa PSII cabang Barru sekitar tahun 1933. Masa itu tampil ke depan Kyai Haji Maulana, yang dijuluki sebagai "singa podium" yang mengemukakan ide-idenya dalam masa pergerakan secara cemerlang, bahwa

⁷Abd. Gaffar Musa, Op.Cit. hal. 48.

⁸Abd. Gaffar Musa, Op.Cit. hal. 50.

perjuangan menentang keras penjajah dan berusaha membunuh orang-orang kafir di mana dan kapan saja ia berada, itu adalah cita-cita perjuangan PSSI. Akibat ucapan beliau itu dihadapan Massa di Barru maka kiyai Haji Maulana di tangkap dan selanjutnya dihadapkan di muka sidang hadat pemerintah Tanete. Dalam persidangan Kiyai Haji Maulana di beri keringanan untuk merubah kata-kata yang diucapkan itu, namun beliau tetap dalam pendiriannya, bahwa yang saya maksudkan "Kafir" itu adalah kontrolir dan Datu Tanete yang bekerja sama pemerintahan Hindia Belanda. Akhirnya beliau dijatuhi hukuman buangan ke Cilacap (Jawa Tengah) bersama tokoh-tokoh PSII lainnya seperti : Tenri-sessu dan Muhammad Amin.⁹

Selanjutnya seperti, pada tahun 1942, ketika terjadi pertempuran antara Jepang dan Belanda di kampung Ralla, Tanete-Barru di mana pada kedua belah pihak mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Dalam pertempuran tersebut organisasi PSII di bawah pimpinan Haji Bica memimpin sejumlah massa dari pemuda-pemuda untuk membantu pihak Jepang, karena menentang kehadiran kembali orang-orang Belanda. Akibat bantuan PSSI ini, maka pemerintah Belanda (Zelbestuur) Barru secara diam-diam (mengadu domba) melaporkan kepada tentara Jepang, bahwa PSSI itu

⁹ Wawancara dengan Drs. Hasan, tanggal 20 Pebruari 1992.

sangat berbahaya dan kelak akan menjadi musuh dalam selimut bagi pemerintahan Jepang dan pemerintahan Belanda. Akibat hasutan pemerintah Belanda itu, maka Jepang berbalik membenci PSSI, dan secara spontan menangkap sejumlah tokoh-tokoh PSSI, yang kemudian dimasukkan dalam penjara baik di Pare-pare, Makassar maupun di Barru sendiri. Tokoh PSSI yang dipenjarakan oleh pemerintah Jepang itu antara lain; Haji Abdul Kadir, Haji Muhammad Husain, Mursalim Ramang, Abd. Kadir Daeng Mangun Harun dan lain-lain.¹⁰

Menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu sekitar bulan Juli 1945, salah seorang tentara Jepang yang bernama " Tuan ZUZUKI " memberikan informasi kepada Haji Abd. Kadir Jaelani (pimpinan PSSI) bahwa Indonesia, yaitu segera akan diberikan kemerdekaan. Untuk itu, maka di harapkan kepada para pemimpin/tokoh-tokoh PSSI Barru-Tanete dan segenap para anggota-anggotanya mempersiapkan diri dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Dan karena itulah para tokoh-tokoh PSSI mencetuskan suatu ide untuk melakukan suatu pertemuan dengan segenap lapisan masyarakat Tanete-Barru. Pertemuan ini dilakukan didalam ruangan mesjid Lalabata Barru.¹¹

Dalam pertemuan itu, guna menghadapi segala kemungki-

¹⁰Wawancara dengan Andi Syukur, tanggal 21 Pebruari 1992. Dan H. M. Jauharuddin tanggal 18 Pebruari 1992.

¹¹Wawancara dengan Drs. Sulaiman, tanggal 24 Pebruari 1992.

nan, terutama menghadapi kembali kedatangan tentara NICA/ Belanda yang membonceng pasukan Sekutu, maka para pemimpin dan segenap masyarakat setuju membentuk suatu nama lasykar perjuangan di Tanete Barru, yaitu Gerakan Pemuda Tanete (GPT). Organisasi ini pada mulanya dipimpin oleh Haji Andi Abdul Muin, Haji Abdul Kadir, Abdul Karim (sebagai komandan pasukan) dari Pemuda Muslim Indonesia.

Sepak terjang Gerakan Pemuda Tanete (GPT) ini dalam mempertahankan kemerdekaan di daerah Barru banyak meminta korban terutama dari pihak lawan, yaitu tentara NICA/ Belanda. Tetapi tidak dilupakan pula, dari personel GPT sendiri telah meminta korban yang tidak sedikit, mereka gugur sebagai kusuma bangsa demi mempertahankan Indonesia merdeka.

4.2. Perjuangan Mempertahan Kemerdekaan

Gerakan-gerakan perjuangan dalam bentuk kesatuan lasykar di daerah-daerah Sulawesi Selatan pada tahun 1945-1950 sesungguhnya memiliki sifat yang berbeda dengan perlawanan bersenjata di tempat-tempat lain dalam wilayah Nusantara. Sifat yang berbeda itu bukan hanya karena kedudukan pusat pemerintahan Sulawesi yang berkedudukan di Makassar dijadikan sebagai markas besar tentara NICA, tetapi juga kemudian dikembangkannya menjadi pusat pemerintahan Negara Indonesia Timur. Daerah Sulawesi Selatan adalah merupakan suatu arena, sebagaimana pula daerah-daerah lainnya, dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan bagi kekuatan-kekuatan

perjuangan yang dibentuk dan dibina dalam wilayah itu sendiri dan juga kekuatan perjuangan yang dipersiapkan dari pusat pemerintah republik.

Seperti yang dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa setelah tentara Sekutu berhasil mengambil alih pemerintahan sipil di daerah Sulawesi Selatan, maka mulailah orang-orang Belanda (NICA) mengadakan provokasi dan penghinaan terhadap orang-orang yang memakai lencana merah putih dari para pemuda-pemuda yang berjiwa patriotisme. Di Makassar tanggal 2 Oktober 1945 serombongan tentara Belanda yang mengendarai truk tiba-tiba melepaskan tembakan secara membabi buta kepada penduduk sipil yang mengakibatkan jatuhnya beberapa korban. Aksi teror tentara NICA ini berlangsung sepanjang jalan Pattunuang, Ranggong, Pisang dan lain-lain. Akibatnya timbullah kemarahan rakyat Makassar pada khususnya dan daerah-daerah lainnya pada umumnya, yang mana kota Makassar dianggap sebagai pusat pergerakan di Sulawesi Selatan. Karena yang terlibat dalam penembakan itu adalah ketubuhan dari suku Ambon, maka diberilah nama dengan Ambon Moord.

Seperti dikemukakan di atas bahwa dalam rangka menentang kehadiran kembali orang-orang Belanda (NICA), maka para pemuda-pemuda di daerah Barru membentuk kesatuan-kesatuan organisasi, khususnya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Dalam rangka menyempurnakan organisasi-organisasi kelasykaran seperti GAPIS, KRIS Soppeng Riaja, Gerakan

Pemuda Tanete (GPT) dan sebagainya, mereka mencari dan membuat persenjataan yang amat sederhana seperti bambu runcing dan membuat persenjataan dari kayu.¹² Di samping itu juga para pemuda-pemuda mengadakan latihan militer, seperti yang dilakukan oleh GPT Tanete-Barru. Pelatibnya didatangkan secara bergiliran dari Makassar, antara lain Ali Malaka, Alimuddin, Ishak Bonto dan Sumarno. Pemuda-pemuda yang bernaung dalam organisasi kelasykaran di daerah Barru bahkan mendapat perintah dari Andi Abdullah Bau Massepe di Pare-Pare agar memutuskan hubungan lalu lintas Makassar-Pare-Pare. Perintah itu dijalankan oleh GPT, yaitu dengan melakukan penghadangan di jembatan Bottoe terhadap iring-iringan tentara NICA. Dalam penghadangan ini beberapa anggota kelasykaran GPT gugur yaitu Abdul Kadir Jero, yang merupakan salah seorang dari pemimpin GPT, yang melucuti lima buah pistol, satu pucuk sten gun dan dua pucuk sehapan serta beberapa buah granat tangan.¹³

Gugurnya anggota kelasykaran ini semakin membangkitkan semangat juang anggota yang lain, terutama dari mereka yang tergolong masih muda. Untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak, maka diputuskanlah untuk mundur dari Bottoe menuju daerah pegunungan.

Sebelum penghadangan di Bottoe itu, GPT (Gerakan Pemuda Tanete) terlebih dahulu melakukan penghadangan di jalur Tanete - Mandalle. Namun dalam aksi - aksi yang dilaku-

¹²Wawancara dengan Hasan, tanggal 20 Oktober 1992.

¹³Aminullah Lewa, Bugis-Makassar Melawan Kolonialisme 1942-1945 Jilid II. (Ujung Pandang : Tp., 1982), hal. 8.

kan itu menyebabkan beberapa anggota GPT gugur seperti Abd Karim dan Andi Batueja. Setelah peristiwa tersebut tentara NICA semakin menekan gerakan GPT serta menangkap beberapa pemimpin-pemimpinnya, seperti H. Andi Abd. Kadir Andi Abdul Mis dan Abdul Kadir Jaelani.¹⁴ Karena itulah dengan sendirinya para pemuda-pemuda dari GPT mulai ter-
pencar dan melanjutkan perjuangan yang sebagian besar bergabung dengan kelasykaran Harimau Indonesia (HI), yang pada saat itu dipimpin oleh Muhammad.

Pada hakekatnya pimpinan GPT, Andi Abdul Muis dan Andi Abdul Kadir adalah seorang aktivitas dari organisasi Sarikat Islam sebelum perang Asia Timur Raya, bersama dengan anggota-anggota lainnya ; yaitu Abd. Karim, Muhammad Amir, Abd. Kadir Jaelani, La Enang alias DjanggoE, Andi Syukur, Andi Batueja, Andi Amin, Andi Asman dan beberapa kepala Kampung Garassi.

Dari sumber yang diperoleh menyebutkan bahwa ketika pimpinan GPT, Andi. Muis Tenridolong di Tanete, sepulangnya dari Soppeng, merencanakan akan ke Pulau Jawa untuk mencari persenjataan, sebab tanpa persenjataan gerakan perlawanan GPT, tidak akan berarti. Namun sebelum beliau berangkat ia ditangkap oleh NICA, karena rencana keberangkatan diketahui oleh NICA. Beliau ditangkap sekembalinya dari sembahyang Hari Raya Idul Adha di Tanete. Selain itu

¹⁴Wawancara dengan Andi Syukur, tanggal 21 Pebruari 1992

ditangkap pula Andi Abdul Kadir Tenrissesu pada bulan Maret 1946 di Pancana, keduanya ditahan di Lisu sekitar dua Minggu lamanya kemudian dipindahkan ke Barru.¹⁵ Dengan tertangkapnya tokoh GPT itu merupakan suatu pukulan berat bagi organisasi-organisasi kelasykaran di Sulawesi Selatan, khususnya GPT sendiri. Namun sisa-sisa GPT bersama dengan kelasykaran Ganggawa di bawah pimpinan Arifin Nu'mang beserta kelasykaran Harimau Indonesia (HI) di bawah pimpinan Muhammad Syah berusaha melepaskan beliau dengan menyerbu penjara di Barru, tapi dalam penyerbuan itu Andi Abdul Muis dan Andi Abdul Kadir tidak ditemukan. Akibatnya beliau dipindahkan ke tangsi KNIL di Pare-Pare di mana pada waktu itu juga terdapat Andi Abdullah Bau Massepe, La Halide, Andi Mappatola, Sullewatang Suppa dan Usman Isa.

Hampir sebulan ditahan di Pare-Pare Andi Abd. Muis diangkut ke Makassar untuk diinterogasi di tangsi KIS. Ketika melawati Tanete, beliau diperkenankan oleh oleh Kapten Blumen untuk singgah di Tanete, guna mengambil putranya untuk dibawa ke Makassar. Di Makassar beliau diinterogasi oleh tentara NICA di tangsi KIS selama dua hari. Setelah itu dikembalikan ke Pare-Pare, beliau menukarkan putranya di Tanete (kala itu putranya berusia tujuh tahun). Sekembali dari Makassar di tangsi KNIL Pare-Pare

¹⁵P. Jaya Mappasungka, "Dieksekusi Tembak Mati Karena Tidak Mau Tunduk Kepada Belanda"; Pedoman Rakyat. (Ujung Pandang, edisi 20 Desember 1985), hal. 4 dan 9.

Andi Abdul Muis disiksa dengan segala cara oleh tentara NICA/KNIL sebab beliau tidak mau tunduk dan bekerjasama dengan pihak Belanda. Hal yang sama dialami pula oleh Andi Abd. Kadir Tenrissesu, Andi Abdullah Bau Massepe dan lain-lainnya. Akhir tahun 1947 semua tahanan di Pare-Pare dipindahkan ke Suppa untuk menyaksikan pembantaian secara massal terhadap rakyat dan pejuang yang telah ditangkap serta pembakaran rumah-rumah penduduk oleh pihak KNIL Belanda. Sejak itulah beliau bersama Andi Abd. Kadir dan Andi Abdullah Bau Massepe dipindahkan ke kamp Belanda di Kariango (Pinrang) hingga akhirnya namanya tidak terdengar lagi. Namun sepucuk surat yang ditujukan kepada Zelbestuur Tanete Andi Basso, yang diterima pada tanggal 7 Maret 1947, berasal dari Controleur Barru Abdurrachamn tertanggal 26 Pebruari 1947 No. 92/Geheim. Isinya menyampaikan bahwa pimpinan GPT, Andi Abd. Muis Sullewetang Tanete telah ditembak mati pada tanggal 3 Pebruari 1947 di Kariango Pinrang. Dan menurut Andi Callo, Sullewetang Pinrang, bahwa pada pagi hari tanggal 3 Pebruari 1947 itu dia melihat Andi Abd. Kadir Tenrissesu dibawa oleh pasukan DST/KNIL, anak buah pasukan Kapten Westerling menuju ke utara kota Pinrang dan tidak pernah kembali lagi sampai kini.¹⁶ Jadi Andi Abd. Muis, Andi Ab-

¹⁶P. Jaya Mappasungka, *Ibid.* hal. 9., Aminullah Lewa, *Op.Cit.* hal.12. Wawancara dengan H. M. Jauharuddin, 19 Pebruari 1992.

dullah Bau Massepe dan Andi Abd. Kadir Tenrissesu tidak dieksekusi di Kampung Kariango dan rupanya memang pihak Belanda (KNIL) saat itu sangat merahasiakan kematian dan kuburan Andi Abd. Muis sehingga sampai saat kini belum ditemukan tempat penguburannya.¹⁷

Keberanian serta semangat patriotisme para pemuda organisasi Gerakan Pemuda Tanete (GPT) dalam mempertahankan kemerdekaan di masa lalu, kini oleh Pemerintah setempat mengabadikannya dalam bentuk sebuah monumen, yaitu patung yang menggambarkan seorang pemuda sedang memegang bambu runcing. Monumen yang didirikan pada tahun 1976 ini adalah dimaksudkan untuk memperingati kegigihan para pemuda-pemuda GPT dalam Zaman perjuangan revolusi fisik, dan memang suatu tempat yang amat strategi dalam menghadang musuh (terletak pada perbatasan Kabupaten Barru dan Kabupaten Pangkep, kurang lebih 200 meter dari pintu gerbang Kabupaten Barru).

Perjuangan bersenjata dalam rangka mempertahankan kemerdekaan di Barru berjalan cukup alot dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berkecimpung dalam organisasi perjuangan. Berbagai cara ditempuh hanya berjuang dengan senjata tetapi juga lewat meja perundingan. Di kalangan para pejuang sendiri sering

¹⁷p. Jaya Mapasungka, Loc.Cit. Hal. 9.

terjadi pertentangan terutama mengenai cara dan bentuk gerakan yang diinginkan. Begitu banyaknya organisasi perjuangan dan masing-masing lasykar mempunyai tujuan yang sama meskipun cara beroperasinya berbeda. Untuk mempersatukan mereka maka diadakanlah Konperensi Pacceke.

Pertemuan di Pacceke pada mulanya direncanakan : tanggal 18 Januari 1947, akan tetapi karena ketatnya patroli tentara NICA menyebabkan beberapa pimpinan kelompok organisasi kelasykaran terhambat dalam perjuangan, bahkan ada di antaranya yang terlibat dalam kontak senjata dengan tentara NICA. Karena itulah, maka pertemuan itu baru dapat terlaksana pada tanggal 20 Januari 1947. Konperensi yang berlangsung dua hari ini dihadiri oleh utusan dari beberapa organisasi kelasykaran yang ada di Sulawesi Selatan, antara lain ¹⁸ :

1. KRIS MUDA Mandar di bawah pimpinan Andi Parenrengi,
2. BPRI Suppa di bawah pimpinan Andi Selle Mattola,
3. BPRI Ganggawa di bawah pimpinan Andi Selle Mattola,
4. Harimau Indonesia (HI) di bawah pimpinan Muhammad Syah dan Maulwi Saelan,
5. BPRI Enrekang di bawah pimpinan Andi Abubakar dan Hamid Ali,
6. KRIS Soppeng Riaja di bawah pimpinan Andi Tjabambang Andi Dommeng, Usman Sani dan Azis Tamimi,
7. GAPIS Soppeng di bawah pimpinan M. Idris Palungeng

¹⁸ Natsir Said, dkk. Lahirnya TRI Divisi Hasanuddin Di Sulawesi Selatan Dan Tenggara. (Ujung Pandang : Tim Penelitian Sejarah Perjuangan Rakyat Sulselra, 1981) hal. 50.

8. Benteng Makassar di bawah pimpinan Daeng Bonto dan Daud Sija.

Konperensi itu telah memutuskan untuk membentuk suatu resimen dengan pembagian atas beberapa batalyon serta penentuan daerah operasionalnya. Resimen itu kemudian diberi nama Tentara Republik Indonesia Divisi Hasanuddin (TRI Divisi Hasanuddin). Sebagai Panglima pertama dari TRI Divisi Hasanuddin diangkatlah Andi Abdullah Bau Massepe dengan pangkat Letnan Jenderal. Oleh karena Andi Abdullah Bau Massepe tidak berada di tempat (Pare-Pare), maka untuk sementara diganti oleh Mayor Andi Mattalata dengan M. Saleh Lahade sebagai Wakil Kepala Staf. Staf TRI Divisi Hasanuddin dibagi dalam empat seksi, masing-masing ; Kapten Muhammad Syah, Kapten Maulawi Saelan, Kapten Andi Sapada dan Kapten Andi Oddang. Untuk lancarnya tugas kemiliteran maka TRI Divisi Hasanuddin pun dibagi-bagi lagi dalam tiga resimen dan masing-masing resimen membawahi beberapa Komandan Batalyon, di antaranya ; Resimen Pertama dengan pusat Pare-Pare dipercayakan kepada Andi Selle Mattola (Pimpinan gabungan dari BPRI Suppa dan Ganggawa), Resimen Kedua dengan daerah operasionalnya Makassar dan sekitarnya dipercayakan kepada Padjonga Daeng Ngalle Karaeng Polongbangkeng, dan Resimen Ketiga dengan wilayah operasi Luwu dipegang oleh Andi Jemma (Datu Luwu).¹⁹

¹⁹Natsir Said, dkk. Ibid. hal. 56.

TRI Divisi Hasanuddin sebagai lembaga militer yang didirikan sebagai hasil konvensi Konperensi Pacceke itu, adalah dalam rangka menyatukan wadah perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Selain itu bertujuan pula untuk mengimbangi meningkatnya kegiatan tentara NICA, terutama setelah NICA memperkuat kedudukannya dengan mendatangkan pasukan bantuan yang lebih dikenal dengan istilah Divisi 7 Desember 1946 di bawah pimpinan Kapten Westerling. Sebaliknya dengan bertambahnya kekuatan tentara NICA ini, ternyata dapat menggoyahkan perjuangan rakyat dan sekaligus menyulitkan usaha koordinasi antara organisasi kelasykaran di daerah-daerah. Demikian pula operasi-operasi yang dilancarkan NICA, terutama "Aksi Pembersihannya" yang menyebabkan ketakutan massal di kalangan rakyat yang pada akhirnya mengacaukan semangat perjuangan para pemuda-pemuda.

Pertengahan tahun 1947 perjuangan bersenjata dari beberapa organisasi kelasykaran baik di Barru maupun di wilayah lainnya di Sulawesi Selatan semakin menurun, terutama disaat makin meningkatnya serangan-serangan Belanda pada tempat-tempat persembunyian pimpinan organisasi kelasykaran. Demikianlah para pejuang yang ingin tetap melakukan perlawanan mengalihkan kegiatannya pada gerakan-gerakan bawah tanah sebab untuk melakukan perjuangan bersenjata tidak memungkinkan lagi.

Semangat perjuangan yang tidak pernah kendor itu

akhirnya dapat kembali memancarkan sinarnya pada saat Belanda terpaksa harus menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia sendiri. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1950 tekad juang yang merupakan cita-cita perjuangan rakyat berhasil terwujud dengan diumumkannya kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.



BAB V

K E S I M P U L A N

Perjuangan kemerdekaan telah melahirkan konflik antara kita, baik terhadap Belanda maupun dengan Jepang. Perang dan diplomasi dipergunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik itu.

Periode terpenting dari perjuangan kemerdekaan di Barru adalah rangkaian peristiwa-peristiwa yang mulai terjadi pada akhir bulan Desember 1946. Terjadinya gerakan-gerakan bersenjata dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan adalah sebagai reaksi atas pembunuhan yang dilakukan oleh NICA dan sebagai jawaban atas dominasi politik NICA yang kian bertambah dalam.

Ada dua format perjuangan yang ditempuh oleh organisasi-organisasi kelasykaran baik pada masa pendudukan Jepang maupun pada zaman penjajahan Belanda. Pertama, adalah perjuangan dengan kekuatan bersenjata yang dikoordinir oleh masing-masing badan perjuangan. Gerakan Pemuda Tanete (GPT) adalah model organisasi kelasykaran yang mewakili tipe perjuangan yang disebut pertama. Tokohnya adalah Andi Abdul Muis dan kegiatannya terlaksana dengan koordinasi yang sangat rapih. Konsentrasi perjuangannya ditujukan, terutama untuk melakukan penghadangan terhadap tentara NICA di tempat-tempat yang strategis, memutuskan hubungan telekomunikasi antara Makassar dengan Pare-Pare di bawah pimpinan Sumarno. Selain GPT ada pula Harimau Indonesia di bawah pimpinan

Muhammad Syah. Harimau Indonesia (HI) ini merupakan cabang dari HI yang berkedudukan di Makassar. Tidak dilupakan pula PPNI (Pusat Pemuda Nasional Indonesia), dan KRIS Soppeng Riaja yang berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan di Barru dan daerah sekitarnya. Organisasi yang disebut pertama ini mempunyai sifat perjuangan yang sangat radikal sehingga sulit diidentifikasi oleh lawan di wilayah bagian mana mereka berjuang.

Selain organisasi perjuangan yang bersifat radikal itu, maka organisasi lainnya yang bersifat sosial pun muncul dan bergerak sendiri namun saling membantu seperti dengan jalan membina kader-kader pemuda, mengumpulkan makanan, pakaian-pakaian bekas, obat-obatan, uang serta barang-barang lainnya. Organisasi itu antara lain Pandu Hisbhul Wathan dari Muhammadiyah dengan tokohnya antara lain Andi Azis Tamimi, Pemuda Pelajar Darul Dakwah wal Irsyad dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Kedua, perjuangan yang ditempuh dengan jalur diplomasi, terutama dilakukan oleh tokoh-tokoh tua yang aktif pada masa pergerakan, seperti Abdurachman Rahe dan Abdul Kadir. Perjuangan dengan cara ini telah berhasil meyakinkan para pejuang bahwa perjuangan yang dilakukannya mendapat simpati dari rakyat luas, dan di pihak lain telah berhasil melakukan kontak atau hubungan dengan penjajah melalui meja perundingan.

Usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan, tidak hanya di Barru tapi juga di daerah-daerah lainnya di Indonesia, terutama dilakukan dengan kekuatan bersenjata dan lewat jalur perundingan. Perlu diingat bahwa satu-satunya wadah perjuangan yang dibentuk untuk pertama kalinya oleh tokoh-tokoh di Sulawesi Selatan dalam mengorganisasi perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka (terutama pada zaman Jepang) adalah SUDARA (Sumber Darah Rakyat) pada tanggal 9 Juli 1945 yang dipimpin oleh Andi Mappanyukki dan Ratulabgi. Organisasi ini merupakan cikal bakal bagi lahirnya organisasi kelasykaran di Barru dan juga di daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan jauh lebih rumit karena ditambah pula oleh adanya rongrongan dari dalam tubuh organisasi kelasykaran itu sendiri. Sementara dari pihak musuh yaitu adanya Agresi Militer Belanda I dan II dan pemberontakan-pemberontakan lainnya yang mengikutinya serta Operasi Pembersihan yang dilakukan oleh Westerling yang kesemuanya menggema di Barru. Perjuangan bersenjata dan diplomasi baru berakhir setelah adanya penyerahankedaulatan atas Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, dan kembalinya Indonesia ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1950.

BIBLIOGRAPHY

- Abdulla, Taufik. (Ed)
1985. Sejarah Lokal Di Indonesia. Yogya
karta : Gajah Mada University Press.
- Arfah, Muh.
1980 Biografi Andi Abdullah Bau Masæene.
Ujung Pandang :Tp.
- Frederick, William H.
1986 "Pendudukan Jepang", Colin Wild dan
Peter Carey, (Peny), Gelora Api
Revolusi sebuah Ontologi Sejarah.
Jakarta : Gramedia.
- Harvey, Barbara Sillars
1989 Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari
Tradisi Ke DI/TII. Jakarta : Graffiti
Pustaka Utama.
- Jarwadi, Radik.
1972 Naskah Sejarah Corp Hasanuddin .
Ujung Pandang : Tp.
- Kadir, Harun.
1978 Sejarah Daerah Sulawesi Selatan.
Jakarta: Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan.
- Kartodirjo Sartono, dkk
1975 Sejarah Nasional Indonesia. Jakarta :
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Kadir, Harun dkk.
1984 Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia
Di Sulawesi Selatan 1945-1950. Ujung
Pandang : Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan.
- Lewa, Aminullah
1982 Bugis Makassar Melawan Kolonialisme
1942-1945. Ujung Pandang.
- Musa, H. Abd. Gaffar.
1983 Selayang Pandang Daerah Tingkat II Barru.
Barru : Tp

- Piekar, A.J.
1986 "Sebuah Pandangan Belanda Tentang Perjuangan Perjuangan", Colin Wild dan Peter Carey, (Peny). Gelora Api Revolusi Sebuah Ontologi Sejarah. Jakarta ; Gramedia.
- Soebardjo Djojodisoerjo, Ahmad
1972 Lahirnya Republik Indonesia. Jakarta : Kinta.
- Surianingrat, Bayu.
1981 Sejarah Pemerintahan DI Indonesia. Babak Hindia Belanda Dan Jepang. Jakarta : Dewaruci Press.
- Said, Natsir dkk.
1981 Lahirnya TRI Divisi Hasanuddin Di Sulawesi Selatan Dan Tenggara. Ujung Pandang : Tim Penelitian Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan Dan Tenggara.

Artikel :

- Mapasungka, P. Jaya. "Dieksekusi Tembak Mati Karena tak Mau Tunduk Kepada Belanda", Pedoman Rakyat. Ujung Pandang : Edisi 20 Desember 1985
-
- Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kabupaten Barru "Data Sejarah Pendaratan TRIPS". DI Daerah Barru.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Muhammad Ilyas
 Umur : 69 Tahun
 Pekerjaan : Tokoh Masyarakat dan eks anggota DPRD
 Tgl. Wawancara : 10 Februari 1992
2. Nama : H. H. Fauharuddin
 Umur : 72 Tahun
 Pekerjaan : ~~Eks anggota~~ Pemang Praja Df. Barru dan kini pensiunan kantor Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan
 Tgl. Wawancara : 1-20 Februari 1992
3. Nama : Drs. Hasan
 Umur : 51 Tahun
 Pekerjaan : Kepala Urusan Pemerintahan Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru
 Tgl. Wawancara : 20 Februari 1992
4. Nama : Andi Syukur
 Umur : 65 Tahun
 Pekerjaan : Mantan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru Dan Eks Pejuang.
 Tgl. Wawancara : 21 Februari 1992
5. Nama : Drs. Sulaiman
 Umur : 50 Tahun
 Pekerjaan : Kepala Seksi Kebudayaan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru
 Tgl. Wawancara : 24 Februari 1992